

**LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas akuntansi, serta menyediakan informasi keuangan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Pelaporan dalam menyusun Laporan Konsolidasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar Generasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencakup kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan.
- f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, asset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas akuntansi. Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran,
- (b) Neraca,
- (c) Laporan Operasional,
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas,
- (e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus / Defisit-LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa Lebih / Kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan

mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Laporan Operasional

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka disusunlah Laporan Operasional. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disusun agar laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca menyajikan :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN / Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah Daerah antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- j. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 900/0019385 tanggal 6 November 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Pasal 296 ayat 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

- 3.2 Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

- 5.1 Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.1.1 Aset
 - 5.1.2 Kewajiban
 - 5.1.3 Ekuitas Dana
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2.1 Pendapatan
 - 5.2.2 Belanja
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1 Pendapatan
 - 5.3.2 Beban
- 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi nasional pada tahun 2018 tumbuh 5,18% meningkat dibandingkan tahun 2017 yang tumbuh 5,07%. Tren perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 ditopang permintaan domestik. Dorongan permintaan domestik terutama berasal dari solidnya konsumsi rumah tangga di semua wilayah sejalan dengan meningkatnya pendapatan dan ekspektasi masyarakat di tengah inflasi yang terjaga. Selain itu, konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) juga tumbuh meningkat di sebagian besar wilayah didorong oleh persiapan penyelenggaraan Pemilu 2019. Konsumsi pemerintah turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui belanja pegawai dan belanja bantuan sosial, terutama di Jawa. Investasi tetap tumbuh tinggi didorong optimisme investor yang terjaga terhadap prospek perekonomian Indonesia, meski pertumbuhan investasi tidak setinggi triwulan lalu, karena telah berakhirnya proyek pembangunan infrastruktur dalam rangka Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

Dorongan permintaan domestik mengakibatkan impor masih tumbuh tinggi terutama impor konsumsi dan bahan baku, meski cenderung melambat dibandingkan triwulan lalu. Perlambatan impor tersebut disumbang impor bahan baku karena melambatnya industri pengolahan di sebagian besar wilayah, sejalan dengan tertahannya kinerja ekspor. Selain itu, aktivitas pembangunan proyek infrastruktur terutama di Jawa dan Sumatera yang melambat pada triwulan ini juga ikut menahan pertumbuhan impor barang modal. Sementara, ekspor tumbuh melambat karena pertumbuhan permintaan negara mitra dagang utama yang terbatas, terutama pada produk industri Jawa. Selain itu, melambatnya harga berbagai komoditas SDA utama Indonesia memengaruhi kinerja ekspor CPO dan karet di Sumatera, serta nikel di Sulawesi. Namun, membaiknya harga batu bara di triwulan IV 2018 mampu menahan tekanan lebih dalam pada ekspor di Kalimantan. Secara netto, impor yang melambat lebih dalam dibandingkan ekspor menyumbang negatif net ekspor yang lebih rendah pada triwulan ini.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perbaikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan terutama ditopang oleh perbaikan kinerja pertanian, pertambangan, dan jasa-jasa. Kinerja LU pertanian meningkat di Jawa, Sumatera, dan Bali Nusa karena adanya panen padi dan hortikultura. Sementara LU pertambangan tumbuh membaik di seluruh wilayah, kecuali Mapia, didorong perbaikan harga batu bara. Adapun LU jasa-jasa tumbuh meningkat, terutama jasa keuangan di Jawa, sejalan dengan perbaikan ekonomi Jawa yang masih berlanjut.

Secara spasial, berlanjutnya perbaikan ekonomi nasional terkonfirmasi dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jawa, Kalimantan, dan Bali Nusa. Sebagian besar provinsi di ketiga wilayah ini tumbuh meningkat dari triwulan sebelumnya, dengan perbaikan pertumbuhan tertinggi terjadi di Bali Nusa yang didorong oleh perbaikan kontraksi perekonomian NTB yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya pasca terjadinya bencana gempa. Namun, pertumbuhan ekonomi nasional tertahan melambatnya ekonomi Sumatera, Sulawesi, dan Maluku-Papua (Mapia), dengan penurunan terdalam terjadi di Mapia karena kontraksi pertambangan Papua. Sejumlah 25 dari 34 provinsi di Indonesia mampu tumbuh di atas nasional, sehingga hal ini menunjukkan perbaikan ekonomi di triwulan laporan yang cukup merata di sebagian besar daerah.

Perekonomian Jawa tumbuh meningkat dan menjadi penopang utama perbaikan ekonomi nasional, didorong permintaan domestik. Ekonomi Jawa tumbuh 5,82%, merupakan pertumbuhan tertinggi sejak triwulan I 2015. Tingginya pertumbuhan ekonomi Jawa ditopang konsumsi swasta yang tumbuh kuat didorong pola belanja terkait Natal dan Tahun Baru, serta tingginya aktivitas persiapan Pemilu. Konsumsi pemerintah juga tumbuh meningkat didorong optimalisasi belanja di akhir tahun, terutama realisasi Dana Desa dan bantuan sosial. Investasi juga masih tumbuh tinggi, meski tak sekuat triwulan sebelumnya, dipengaruhi telah selesainya pembangunan terkait Asian Games, berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah memasuki fase penyelesaian, serta penundaan pembangunan infrastruktur kelistrikan oleh Pemerintah. Kuatnya permintaan domestik tersebut mendorong impor yang tumbuh cukup tinggi, meski tidak sekuat triwulan sebelumnya karena melambatnya impor barang modal terkait infrastruktur serta impor bahan baku, sejalan dengan melambatnya kinerja industri pengolahan. Ekspor industri Jawa tertahan karena melemahnya permintaan negara mitra dagang sejalan dengan perlambatan ekonomi dunia, terutama untuk ekspor industri tekstil, makanan-minuman, dan alat angkutan. Dari sisi LU, akselerasi ekonomi Jawa didorong perbaikan LU.

Sementara itu, pada triwulan IV 2018, perekonomian Jawa Tengah mencatatkan percepatan pertumbuhan menjadi sebesar 5,28% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (5,21%; yoy). Kinerja perekonomian Jawa Tengah tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat pada level 5,18% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan Kawasan Jawa sebesar 5,82% (yoy).

Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 berasal dari komponen konsumsi swasta, yang terdiri dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRRT), serta konsumsi pemerintah. Sementara kinerja investasi dan ekspor luar negeri tetap tumbuh meskipun mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya. Impor luar negeri Jawa Tengah masih tercatat tumbuh relatif signifikan, meskipun mulai melandai dibanding dua triwulan sebelumnya. Sebagai komponen pengurang PDRB, relatif tingginya pertumbuhan impor menahan perekonomian Jawa Tengah untuk tumbuh lebih tinggi.

Ditinjau dari sisi lapangan usaha, meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, tingginya pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan turut mendorong pertumbuhan pada triwulan laporan. Namun demikian, melambatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dibanding triwulan sebelumnya menjadi faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi.

Dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan IV 2018 yang meningkat, secara keseluruhan tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat mengalami perbaikan dibandingkan capaian 2017. Pada tahun 2018, ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh 5,32% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun lalu (5,26%; yoy). Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRRT, dan investasi menjadi factor pendorong pertumbuhan ekonomi pada 2018. Akan tetapi, komponen impor luar negeri yang juga meningkat signifikan menjadi penahan pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Sementara dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih ditopang oleh meningkatnya kinerja pertanian dan industri pengolahan, sedangkan kinerja lapangan usaha perdagangan pada 2018 justru menunjukkan perlambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh turunnya margin perdagangan untuk barang-barang

yang berasal dari impor. Dengan capaian ini, tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2018 masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional yang sebesar 5,17% (yoy).

Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 tercatat 2,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2018 (2,79%; yoy). Namun demikian, capaian inflasi secara keseluruhan tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Berdasarkan disagregasi kelompoknya, penurunan inflasi tahunan pada tahun 2018 terutama disebabkan oleh meredanya tekanan inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, serta kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang didorong oleh kebijakan tarif biaya komoditas bahan bakar minyak. Peningkatan permintaan barang dan jasa oleh masyarakat juga meningkat pada hari raya dan periode liburan yang berlangsung pada akhir tahun 2018.

Di tengah kinerja perekonomian yang membaik, penyaluran kredit dan pertumbuhan DPK masih menunjukkan pertumbuhan, walaupun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit pada sektor RT menunjukkan peningkatan pertumbuhan. Kredit utamanya digunakan untuk membiayai multiguna, KPR, dan KKB, dengan NPL masing-masing terjaga, jauh di bawah batas aman. Meningkatnya permintaan jelang Natal dan Tahun Baru, serta relatif menguatnya nilai tukar Rupiah menjadi faktor yang mendorong kinerja penjualan, profitabilitas, serta repayment capacity korporasi pada triwulan laporan. Terkait upaya pengembangan dan akses keuangan, penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah konsisten tertinggi di nasional. Pangsa kredit UMKM mencapai 40,19% dari total kredit, dengan kualitas kredit yang relatif terjaga.

2.2. Kebijakan Keuangan

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Sedangkan misi sebagai penjabaran visi diatas adalah :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memperluas reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Selanjutnya visi dan misi tersebut diatas diimplementasikan ke dalam program kerja sebagai berikut :

1. Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi, dan magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah dan guru mengaji;
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDesa dan pelatihan *startup* untuk wirausaha muda;

6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi masal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel;
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mendukung kepada upaya pencapaian visi, misi, serta program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode kepemimpinan Tahun 2018-2023 yaitu pada misi kedua “Memperluas Reformasi Birokrasi Yang Dinamis serta Memperluas Sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota” dan program kerja ketiga “Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota Yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi”.

Adapun dalam rangka implementasi visi dan misi tersebut diatas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan pembangunan bidang kepegawaian adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN”, sebagai wujud dari amanah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan 2 (dua) Sasaran, yaitu Distribusi Penempatan PNS Dalam Jabatan dan Pelayanan Kepegawaian Yang Cepat dan Terintegrasi.

Strategi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan pegawai dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan yang akan pensiun dalam lima tahun.
2. Pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif.
3. Pengembangan karir melalui pembinaan karier dan peningkatan kompetensi.
4. Promosi, mutasi dan rotasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
5. Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja dengan metode yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan penyusunan strategi untuk mengatasinya serta penggunaannya untuk promosi, mutasi dan demosi serta diklat.
6. Pengajian, penghargaan berdasarkan penilaian kinerja dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku pegawai ASN.
7. Perlindungan dan pemberian kemudahan dalam pelaksanaan tugas.
8. Penyediaan sistem pendukung untuk peningkatan kualitas layanan kepegawaian.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, pada awal tahun pelaksanaan Renstra memiliki 3 (tiga) program, dengan jumlah kegiatan sebanyak 40 kegiatan. Yang merupakan program strategis hanya 1 (satu) yaitu Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah sedangkan 2 (dua) program yang lain merupakan program operasional atau penunjang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah dengan jumlah kegiatan sebanyak 22 kegiatan;

2. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah kegiatan sebanyak 16 Kegiatan;
3. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Provinsi Jawa Tengah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta
3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya, dan Dana Insentif Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ikut memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui fasilitasi pengadaan CPNS Kab/Kota, penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) Kab/Kota, dan penyelenggaraan *Position Competencies Assessment Program (PCAP)* dan *Quasi Assessment Program* Kab/Kota. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2018 mengupayakan beberapa hal yaitu :

1. Membangun sistem dan prosedur administrasi pembayaran fasilitasi pengadaan CPNS Kab/Kota, penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) Kab/Kota, dan penyelenggaraan *Position Competencies Assessment Program (PCAP)* dan *Quasi Assessment Program* Kab/Kota berbasis *online system*;
2. Optimalisasi dan pemberdayaan Gedung Tes Media Menggunakan Komputer (TMMK) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah di Srandol

Beberapa upaya ini dilakukan agar Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung diarahkan untuk :

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
2. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
3. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat.

Kebijakan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 diarahkan untuk :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu Belanja Pegawai dialokasikan untuk penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 difokuskan untuk Belanja Pegawai. Belanja Pegawai dialokasikan untuk penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Belanja Pegawai ini tidak hanya dialokasikan bagi PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, tetapi juga bagi CPNS Provinsi Jawa Tengah, Praja IPDN yang ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah, dan PNS Kementerian/Kab/Kota yang mutasi ke Provinsi Jawa Tengah.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kebijakan Belanja Langsung pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 diarahkan untuk :

1. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
2. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
3. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

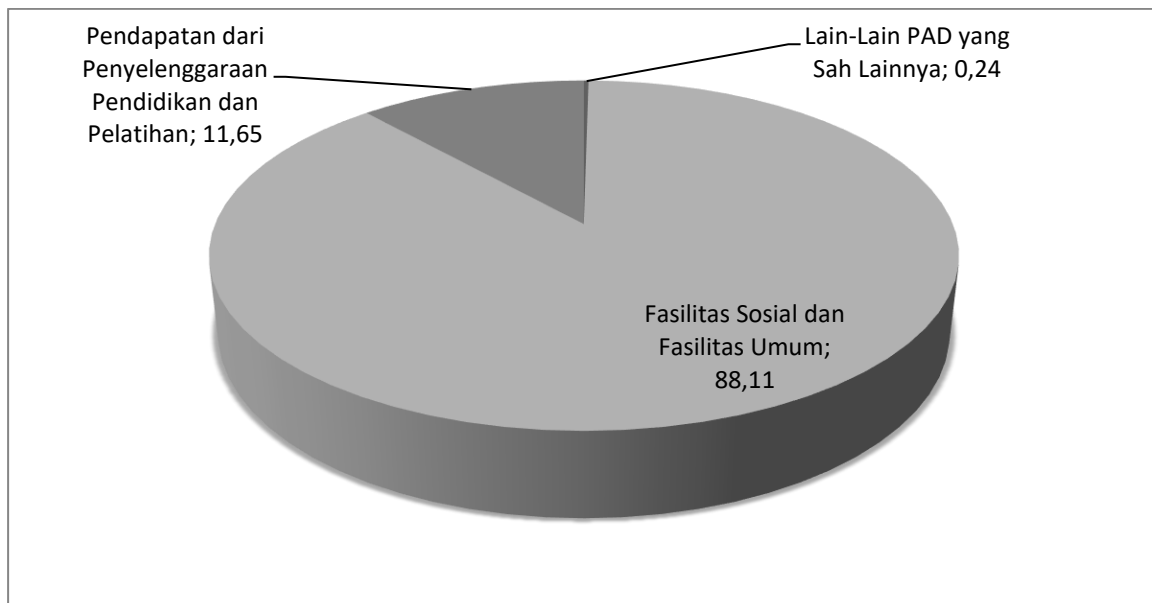
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan Daerah

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.6.477.500.000,- dengan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp.7.283.780.000,- atau 112,45%. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp.6.363.380.000,- (691,37%) apabila dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.920.400.000,-. Peningkatan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang tajam ini dikarenakan adanya kebijakan pengadaan CPNS Daerah Formasi Tahun 2018.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut terdiri dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum sebesar Rp.6.417.480.000,- (88,11% dari total realisasi pendapatan), Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.848.800.000 (11,65% dari total realisasi pendapatan), dan Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp.17.500.000,- (0,24% dari total realisasi pendapatan).

GAMBAR 3.1
PROPORSI SUMBER LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
TAHUN ANGGARAN 2018 (DALAM %)



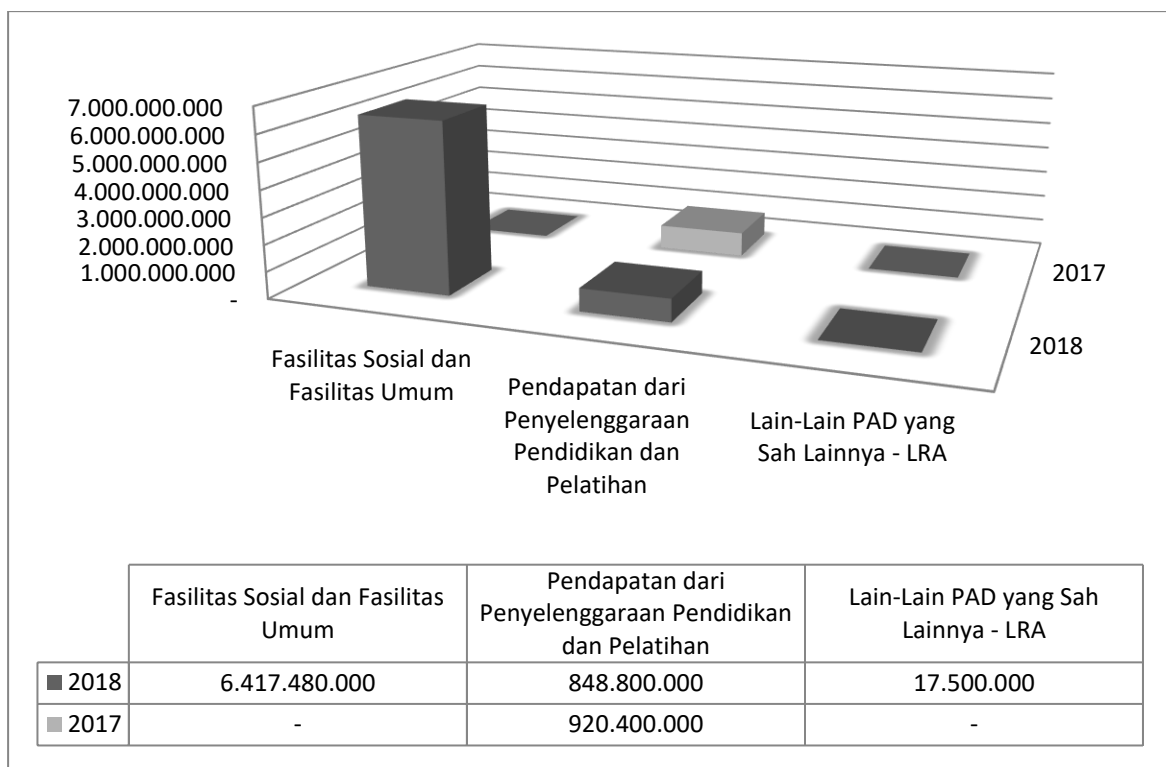
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018

Anggaran Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.5.600.000.000,- terealisasi sebesar Rp.6.417.480.000,- atau 114,60%. Realisasi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Tahun Anggaran 2018 tersebut terdiri dari Realisasi Fasilitas Umum sebesar Rp.6.417.480.000,-. Adanya Realisasi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.6.417.480.000,- dikarenakan adanya fasilitasi pengadaan CPNSD Kab/Kota Formasi Tahun 2018.

Anggaran Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.860.000.000,- dengan Realisasi sejumlah Rp.848.800.000,- atau 98,70%. Realisasi pada tahun 2018 ini mengalami penurunan sebesar Rp.71.600.000,- atau 7,78% dibandingkan dengan Realisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.920.400.000,-. Realisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ini terdiri dari Realisasi Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.550.000.000,- (64,79% dari Total Realisasi) dan Realisasi Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas sebesar Rp.298.800.000,- (35,20% dari Total Realisasi). Realisasi Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan ini stagnan bila dibandingkan Realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp.550.000.000,-. Sedangkan Realisasi Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas mengalami penurunan sebesar Rp.71.600.000,- atau 19,33% bila dibandingkan dengan Realisasi Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.370.400.000,-.

Anggaran Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.17.500.000,- terealisasi sebesar Rp.17.500.000,- atau 100%. Adanya Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.17.500.000,- dikarenakan pada tahun tersebut terdapat pembayaran atas denda CPNS Formasi Tahun 2010 yang mengundurkan diri.

GAMBAR 3.2
PENCAPAIAN KINERJA LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
TAHUN ANGGARAN 2018 & 2017 (RUPIAH)



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 & 2017

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu :

- 1) Kabupaten/Kota melakukan pembayaran secara tunai untuk fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI),
- 2) Mayoritas Kabupaten/Kota tidak melakukan konfirmasi pembayaran fasilitasi pengadaan CPNS Formasi 2018 dan fasilitasi penyelenggaraan *Position Competencies Assessment Program* (PCAP)

dan *Quasi Assessment Program (QAP)* kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan

- 3) Kurangnya koordinasi antara Bendahara Penerimaan dengan Bidang Pengelola Kegiatan Fasilitasi.

Upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara lain :

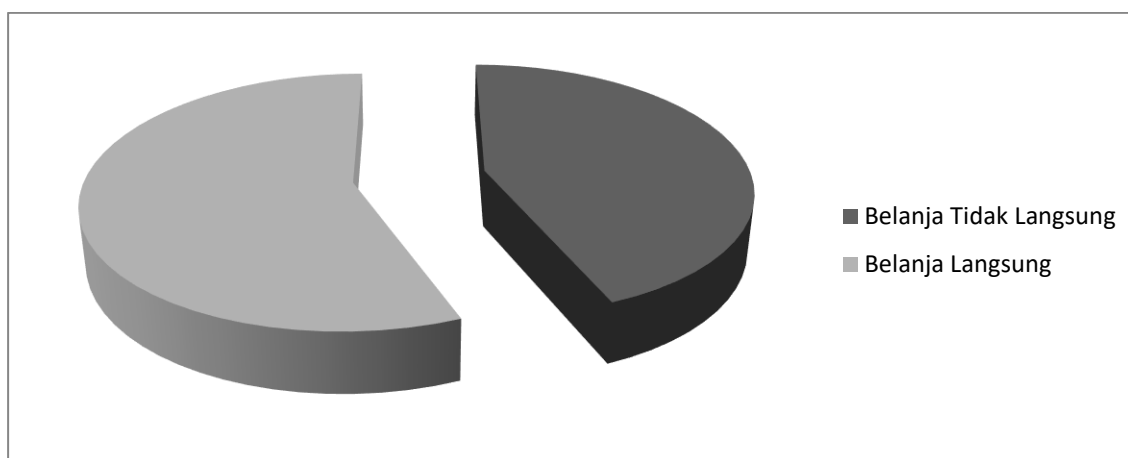
1. Menciptakan suatu aplikasi berbasis web yang dapat memfasilitasi proses pembayaran dari Kabupaten/Kota yang dinamakan aplikasi "*Spin Out*";
2. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada Kabupaten/Kota mengenai penggunaan aplikasi ini;
3. Melaksanakan rekonsiliasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)/Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah; dan
4. Melaksanakan koordinasi dengan bidang yang terkait mengenai data jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi (Pengadaan CPNS dan fasilitasi penyelenggaraan *Position Competencies Assessment Program (PCAP)* dan *Quasi Assessment Program (QAP)*, serta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah).

3.1.2. Belanja Daerah

Anggaran Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.59.842.200.000,- terealisasi sejumlah Rp.50.192.735.179,- atau 83,88%. Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp.11.724.846.420,- atau 30,48% apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.38.467.888.759,-.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.50.192.735.179,- merupakan kontribusi dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.21.994.012.357,- (43,82% dari Realisasi Belanja) dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.28.198.722.822,- (56,18% dari Realisasi Belanja).

GAMBAR 3.3
PROPORSI BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018 (DALAM %)



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018

Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.26.641.062.000,- dengan realisasi sebesar Rp.21.994.012.357,- atau 82,56%. Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018 ini mengalami penurunan sebesar Rp.192.411.503,- atau 0,867% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.22.186.423.860,-.

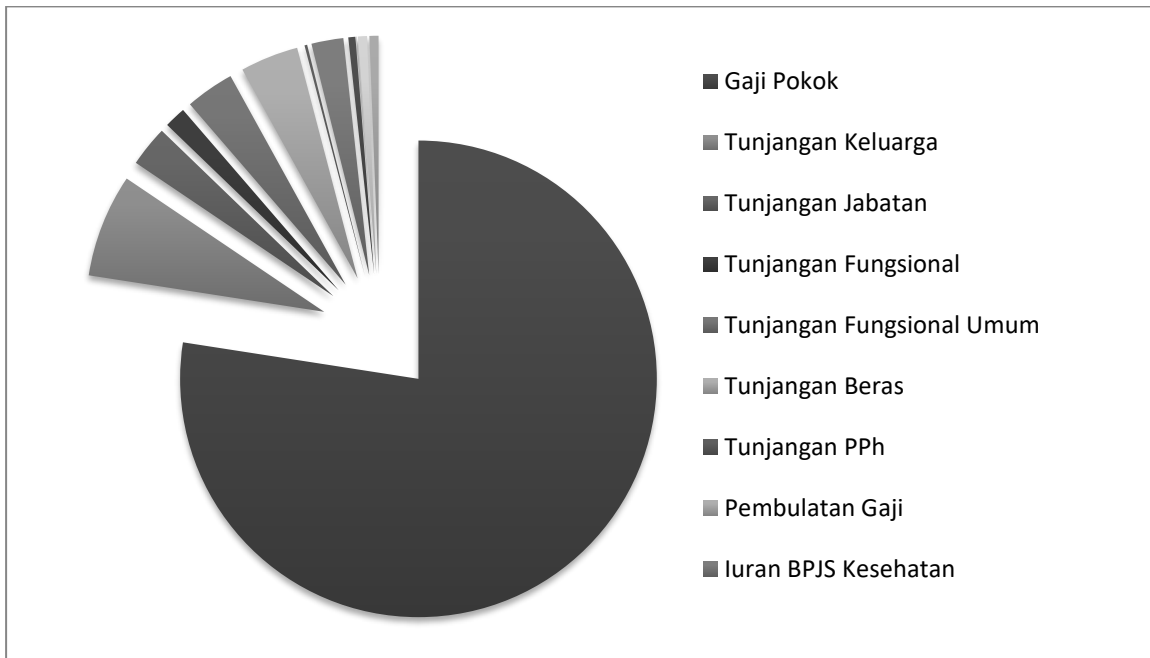
Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.21.994.012.357 terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.9.552.975.979,- (43,43% dari Realisasi Belanja Tidak Langsung) dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp.12.441.036.378,- (56,57% dari Realisasi Belanja Tidak Langsung).

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.10.699.207.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.9.552.975.979,- atau 89,29%. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.752.660.556,- atau 7,30%. Penurunan ini dikarenakan Anggaran Belanja Tidak Langsung CPNSD Formasi Tahun 2017 tidak terealisasi atau dengan kata lain Pengadaan CPNSD Formasi Tahun 2017 tidak dilaksanakan.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ini terdiri dari Realisasi Gaji Pokok PNS/Uang Representasi sebesar Rp.7.470.780.732,- (33,97% dari Realisasi Belanja Tidak Langsung); Realisasi Tunjangan Keluarga sebesar Rp.674.476.942,- (3,07% dari Realisasi Belanja Tidak Langsung); Realisasi Tunjangan Jabatan sebesar Rp.266.400.000,- (1,21% dari Realisasi Belanja Tidak Langsung); Realisasi Tunjangan Fungsional sebesar Rp.140.854.000,- (0,64% dari Realisasi Belanja Tidak Langsung); Realisasi Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp.318.275.000,- (1,45% dari Realisasi Belanja Tidak Langsung); Realisasi Tunjangan Beras sebesar Rp.380.929.200,- (1,73% dari Realisasi Belanja Tidak Langsung); Realisasi Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus sebesar Rp.16.706.725,- (0,08% dari Realisasi Belanja Tidak Langsung); Realisasi Pembulatan Gaji sebesar Rp.104.588,- (0,0005% dari Realisasi Belanja Tidak Langsung); Realisasi Iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp.209.577.090,- (0,95% dari Realisasi Belanja Tidak Langsung); Realisasi Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian sebesar Rp.46.880.395,- (0,21% dari Realisasi Belanja Tidak Langsung); Realisasi Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp.2.516.756,- (0,01% dari Realisasi Belanja Tidak Langsung); dan Realisasi Iuran Jaminan Kematian sebesar Rp.25.474.551,- (0,27% dari Realisasi Belanja Tidak Langsung).

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.15.941.855.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.12.441.036.378,- atau 78,04%. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.560.249.053,- atau 4,72%. Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tahun Anggaran 2018 hanya terdiri dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp.12.441.036.378,-.

**GAMBAR 3.4
PROPORSI BELANJA TIDAK LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018 (DALAM %)**

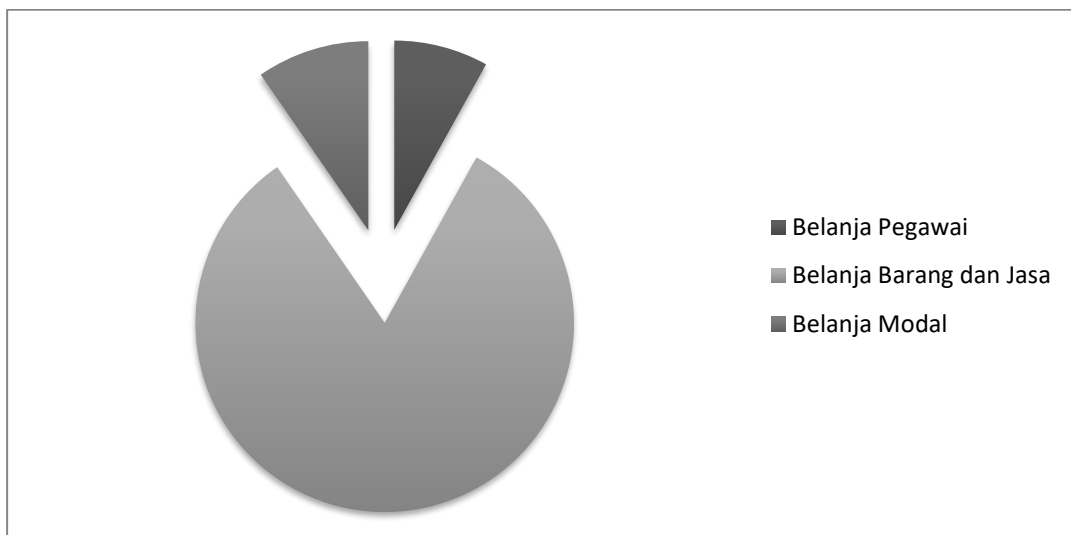


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018

Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.33.201.138.000,- dengan realisasi sebesar Rp.28.198.722.822,- atau 84,93%. Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 ini mengalami kenaikan sebesar Rp.9.078.047.423,- atau 47,48% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.19.120.675.399,-. Kenaikan yang cukup tajam sebesar 47,48% ini dikarenakan adanya Pengadaan CPNSD Formasi Tahun 2018.

Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.28.198.722.822,- terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.2.271.900.000,- (8,06% dari Realisasi Belanja Langsung), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.23.214.417.822,- (82,32% dari Realisasi Belanja Langsung), dan Belanja Modal sebesar Rp.2.712.405.000,- (9,62% dari Realisasi Belanja Langsung).

**GAMBAR 3.5
PROPORSI BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018 (DALAM %)**



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018

Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.3.049.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.271.900.000,- atau 74,50%. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.51.602.000,- atau 2,32% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 Rp.2.220.298.000,-. Hal ini dikarenakan adanya pengadaan CPNSD Provinsi Jawa Tengah Formasi 2018.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.271.900.000,- terdiri dari Realisasi Honorarium PNS sebesar Rp.1.204.700.000,- atau 53,03% (dari Realisasi Belanja Pegawai) dan Realisasi Honorarium Non PNS sebesar Rp.1.067.200.000,- atau 46,97% (dari Realisasi Belanja Pegawai).

Anggaran Honorarium PNS Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.455.900.000,- terealisasi sebesar Rp.1.204.700.000,- atau 82,75%. Realisasi ini terdiri dari Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp.755.850.000,- atau 62,74%; Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp.127.750.000,- atau 10,60%; dan Honorarium Pengelola Keuangan SKPD sebesar Rp.321.100.000,- atau 26,65%.

Anggaran Honorarium Non PNS Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.593.600.000,- terealisasi sebesar Rp.1.067.200.000,-. Realisasi ini terdiri dari Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebesar Rp.459.300.000,- atau 43,04%; Honorarium Pelaksana Kegiatan sebesar Rp.561.900.000,- atau 52,65%; Upah Tenaga Kerja sebesar Rp.41.00.000,- atau 3,86%; dan Uang Picket sebesar Rp.4.800.000,- atau 0,45%.

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.27.159.319.000,- dengan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.23.214.417.822,- atau 85,47%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.9.153.250.923,- atau 65,10% dibandingkan Realisasi Barang dan Jasa sebesar Rp.14.061.166.899,-. Kenaikan ini dikarenakan adanya pengadaan CPNSD Provinsi Jawa Tengah Formasi 2018, sedangkan pada tahun 2017 tidak ada kegiatan pengadaan CPNSD Provinsi Jawa Tengah.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.23.214.417.822,- terdiri dari Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp.1.669.667.575,- atau 7,19%; Realisasi Belanja Bahan/Material sebesar Rp.163.065.450,- atau 0,70%; Realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp.1.645.352.704,- atau 7,09%; Realisasi Belanja Premi Asuransi sebesar Rp.95.977.830,- atau 0,41%; Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp.564.459.192,- atau 2,43%; Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.925.641.100,- atau 3,99%; Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp.2.277.101.000,- atau 9,81%; Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp.69.500.000,- atau 0,30%; Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor sebesar Rp.3.532.075.000,- atau 15,22%; Realisasi Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp.1.938.857.232,- atau 8,35%; Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.6.385.528.978,- atau 27,51%; Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp.2.439.000.000,- atau 10,51%; Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS sebesar Rp.54.689.520,- atau 0,24%; Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.1.100.125.241,- atau 4,74%; dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi sebesar Rp.353.377.000,- atau 1,52%.

Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.992.319.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.2.712.405.000,- atau 90,65%. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.126.805.500,- atau 4,47% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.839.210.500,-. Penurunan ini dikarenakan adanya efisiensi pada

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan Biaya Survey.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.712.405.000,- terdiri dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kantor sebesar Rp.258.370.000,- (9,53% dari Realisasi Belanja Modal); Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga sebesar Rp.187.463.000,- (6,91% dari Realisasi Belanja Modal); Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer sebesar Rp.1.360.395.000,- (50,15% dari Realisasi Belanja Modal); Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp.902.177.000,- (33,26% dari Realisasi Belanja Modal); dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Buku sebesar Rp.4.000.000,- (0,15% dari Realisasi Belanja Modal).

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam membelanjakan anggaran Belanja ini pada Tahun Anggaran 2018 yaitu :

1. Perubahan harga pasar tidak sesuai dengan pagu anggaran;
2. Secara keseluruhan pada tahun 2018 tidak dilaksanakan kebijakan Seleksi Terbuka JPT, namun dilaksanakan tes rotasi/mutasi JPT, maka penyerapan anggaran Kegiatan Pemetaan PNS Potensial untuk Menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jateng tidak maksimal, karena tahapan mutasi lebih sederhana dan tidak sekompleks pengisian/seleksi terbuka;
3. Tidak terpenuhinya target penerima dana beasiswa S2 dan S3 dan tidak ada pengajuan bantuan *cost sharing* tugas belajar S3 , sehingga penyerapan anggaran Kegiatan Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak maksimal;
4. Anggaran Kegiatan Penyelesaian SK Pengangkatan CPNSD tidak terserap maksimal karena pada tahun 2018 tidak menerbitkan SK CPNS;
5. Anggaran Kegiatan Implementasi Manajemen Pengangkatan dan Pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak maksimal karena Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diterbitkan akhir bulan November 2018 dan belum adanya petunjuk teknis.

Upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir permasalahan ini yaitu :

1. Melakukan koordinasi mengenai standarisasi harga alat tulis kantor, makan dan minum, dan cetak sebagai standar harga satuan pada dokumen penganggaran antara Subbag Program, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
2. Melakukan sosialisasi baik tatap muka maupun menggunakan media informasi yang ada seperti Website atau Instagram Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menarik minat PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengikuti tugas belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3.2 Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Jumlah Anggaran setelah perubahan untuk Belanja (baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.59.842.200.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp.50.192.735.179,00 atau 84,93%. Realisasi Belanja Tahun Anggaran sebesar Rp. 50.192.735.179,00 terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.21.994.012.357,- dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.28.198.722.822,-. Belanja Langsung pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 10 (sepuluh) program dan 56 (lima puluh enam) kegiatan.

TABEL 3.1
LAPORAN REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kode Rekening	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Persentase Keuangan	Realisasi Fisik	Keterangan
			(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	
	4.05.4.05.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	26.641.062.000	21.994.012.357	82,56	100,00	
	4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.699.207.000	9.552.975.979	89,29	100,00	
	4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	15.941.855.000	12.441.036.378	78,04	100,00	
	4.05.4.05.01.00.00.5.2	Belanja Langsung	33.201.138.000	28.198.722.822	84,93	100,00	
	4.05.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.672.640.000	4.145.857.731	88,73	100,00	
1	4.05.4.05.01.01.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.080.000	25.080.000	100,00	100,00	
2	4.05.4.05.01.01.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	773.520.000	590.814.104	76,38	100,00	Efisiensi
3	4.05.4.05.01.01.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.755.000	130.755.000	100,00	100,00	
4	4.05.4.05.01.01.0004	Jaminan Barang Milik Daerah	86.212.000	84.279.330	97,76	100,00	
5	4.05.4.05.01.01.0006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	867.000.000	735.470.150	84,83	100,00	Efisiensi
6	4.05.4.05.01.01.0007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	585.200.000	540.664.000	92,39	100,00	Efisiensi
7	4.05.4.05.01.01.0008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.730.000	22.730.000	100,00	100,00	

8	4.05.4.05.01.01.0010	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.700.000	33.475.000	99,33	100,00	
9	4.05.4.05.01.01.0011	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.756.000	11.751.000	99,96	100,00	
10	4.05.4.05.01.01.0013	Penyediaan Makanan dan Minuman	228.800.000	228.502.732	99,87	100,00	
11	4.05.4.05.01.01.0014	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	845.190.000	838.767.915	99,24	100,00	
12	4.05.4.05.01.01.0015	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.062.697.000	904.048.500	85,07	100,00	Efisiensi
	4.05.4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.705.949.000	4.387.664.433	93,24	99,60	
13	4.05.4.05.01.02.0009	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	788.500.000	763.697.241	96,85	100,00	
14	4.05.4.05.01.02.0011	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	569.960.000	564.459.192	99,03	100,00	
15	4.05.4.05.01.02.0012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	70.500.000	70.106.000	99,44	100,00	
16	4.05.4.05.01.02.0014	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	9.500.000	9.500.000	100,00	100,00	
17	4.05.4.05.01.02.0015	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	275.170.000	267.497.000	97,21	100,00	
18	4.05.4.05.01.02.0024	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	2.992.319.000	2.712.405.000	90,65	97,58	Efisiensi
	4.05.4.05.01.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	218.500.000	178.359.587	81,63	100,00	
19	4.05.4.05.01.04.0001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	218.500.000	178.359.587	81,63	100,00	Biaya Kontribusi untuk diklat Asesor tidak terealisasi karena tidak adanya tawaran untuk melaksanakan diklat
	4.05.4.05.01.0005.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	324.800.000	304.705.730	93,81	100,00	
20	4.05.4.05.01.0005.01.0006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.000.000	74.989.500	99,99	100,00	
21	4.05.4.05.01.0005.01.0007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.600.000	42.546.000	99,87	100,00	
22	4.05.4.05.01.0005.01.0013	Penyediaan Makanan dan Minuman	55.000.000	55.000.000	100,00	100,00	

23	4.05.4.05.01.0005.01.0014	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100.000.000	85.010.230	85,01	100,00	Efisiensi
24	4.05.4.05.01.0005.01.0015	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	52.200.000	47.160.000	90,34	100,00	Efisiensi
	4.05.4.05.01.01.	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	211.000.000	204.761.694	97,04	100,00	
25	4.05.4.05.01.01.0022	Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jateng	211.000.000	204.761.694	97,04	100,00	
	4.05.4.05.01.0001.01.	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	7.268.151.000	6.040.196.924	83,11	99,16	
26	4.05.4.05.01.0001.01.0003	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan	106.440.000	106.317.478	99,88	100,00	
27	4.05.4.05.01.0001.01.0004	Penyusunan DSP dan Formasi PNS	210.000.000	202.096.480	96,24	100,00	
28	4.05.4.05.01.0001.01.0006	Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional Khusus	575.000.000	527.600.956	91,76	100,00	Efisiensi
29	4.05.4.05.01.0001.01.0007	Pemetaan PNS Potensial untuk Menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Pem.Prov Jateng	1.626.000.000	873.089.487	53,70	95,10	Secara keseluruhan pada tahun ini tidak dilaksanakan kebijakan seleksi terbuka JPT, namun dilaksanakan tes rotasi/mutasi antar JPT, maka pos anggaran tidak dapat diserap, karena tahapan mutasi lebih sederhana dan tidak sekomplek pengisian/seleksi terbuka
30	4.05.4.05.01.0001.01.0011	Ujian kedinasan PNS Pem.Prov. Jateng dan fasilitasi ujian kedinasan PNS Kab/Kota/BUMD dan instansi lainnya	265.370.000	251.487.390	94,77	100,00	Hanya beberapa Kab/Kota yang ikut fasilitasi dan PNS Gol.II sudah berkurang banyak
31	4.05.4.05.01.0001.01.0013	Evaluasi Kinerja pejabat struktural	190.000.000	164.528.718	86,59	100,00	Hanya dilaksanakan di instansi induk
32	4.05.4.05.01.0001.01.0014	Evaluasi Kinerja pejabat fungsional	175.000.000	174.534.264	99,73	100,00	
33	4.05.4.05.01.0001.01.0031	Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pemprov Jateng	3.249.341.000	2.915.493.935	89,73	95,63	1.Target tugas belajar S2 = 22 PNS hanya terealisasi 21 PNS, 2.Target Tugas belajar S3 = 10 PNS hanya terealisasi 7 PNS, 3.Bantuan Cost Sharing tugas belajar S3 tidak ada yang mengajukan bantuan

34	4.05.4.05.01.0001.01.0033	Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas	621.000.000	585.324.256	94,26	100,00	Pelantikan hanya dilaksanakan 4 kali
35	4.05.4.05.01.0001.01.0037	Implementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	250.000.000	239.723.960	95,89	100,00	
	4.05.4.05.01.0002.01.	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	11.722.122.000	9.075.654.990	83,11	90,01	
36	4.05.4.05.01.0002.01.0005	Pengangkatan CPNSD Pem. Prov. Jateng dan Seleksi Pengadaan CPNSD Kab/Kota	9.200.000.000	6.963.353.412	75,69	99,82	Sisa Lelang
37	4.05.4.05.01.0002.01.0009	Mutasi dan pensiun PNS	725.000.000	681.038.494	93,94	100,00	Sisa dari Harga Negosiasi ATK
38	4.05.4.05.01.0002.01.0010	Seleksi calon praja IPDN dan pembinaan praja IPDN	717.000.000	579.178.099	80,78	100,00	Efisiensi Biaya Transportasi dan Akomodasi
39	4.05.4.05.01.0002.01.0010	Layanan administrasi kepegawaian	105.000.000	84.182.509	80,17	100,00	Kegiatan Pelaksanaan Sum pah Janji PNS yang direncanakan 2 kali dalam setahun, pelaksanaannya hanya 1 kali dalam setahun
40	4.05.4.05.01.0002.01.0032	Evaluasi Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum	103.000.000	98.645.650	95,77	100,00	
41	4.05.4.05.01.0002.01.0036	Implementasi Manajemen Pengangkatan dan Pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	200.000.000	76.156.600	38,08	70,79	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diterbitkan akhir bulan November 2018 dan belum adanya petunjuk teknis
42	4.05.4.05.01.0002.01.0039	Penyelesaian SK Pengangkatan CPNSD	22.122.000	5.359.125	24,23	49,45	Tidak ada penerbitan SK CPNSD pada tahun 2018
43	4.05.4.05.01.0002.01.0040	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS	650.000.000	587.741.101	90,42	100,00	Sisa dari Harga negosiasi ATK
	4.05.4.05.01.0003.01.	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	1.695.776.000	1.653.042.000	97,48	100,00	
44	4.05.4.05.01.0003.01.0016	Penganugerahan Tanda Jasa Kepada PNS Pem. Prov. Jateng dan PNS Kab/Kota	187.000.000	176.199.430	94,22	100,00	Efisiensi Biaya Transportasi dan Akomodasi
45	4.05.4.05.01.0003.01.0016	Pembekalan bagi PNS Pem. Prov. Jateng yang akan Purna Tugas	650.000.000	639.124.000	98,33	100,00	

46	4.05.4.05.01.0003.01.0018	Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS	333.500.000	326.384.500	97,87	100,00	
47	4.05.4.05.01.0003.01.0024	Pembinaan Kesejahteraan PNS Perempuan Prov.Jateng	88.000.000	82.004.870	98,96	100,00	
48	4.05.4.05.01.0003.01.0024	Bintek Pembinaan PNS	172.000.000	170.215.100	98,96	100,00	
49	4.05.4.05.01.0003.01.0035	Pembinaan Korps Profesi ASN	193.576.000	191.129.000	98,74	100,00	
50	4.05.4.05.01.0003.01.0038	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian	71.700.000	67.985.100	94,82	100,00	Efisiensi Biaya Transportasi dan Akomodasi
	4.05.4.05.01.0004.01.	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	1.190.500.000	1.107.210.134	93,00	100,00	
51	4.05.4.05.01.0004.01.0020	Pengembangan sistem informasi data kepegawaian	295.211.000	288.065.401	97,58	100,00	
52	4.05.4.05.01.0004.01.0021	Pengelolaan data tata naskah kepegawaian Administrasi Kepegawaian	301.163.000	273.456.063	90,80	100,00	Efisiensi Biaya Transportasi dan Akomodasi
53	4.05.4.05.01.0004.01.0023	Pengembangan aplikasi simpeg pada SKPD Pem.Prov.Jateng	347.125.000	335.321.491	96,60	100,00	
54	4.05.4.05.01.0004.01.0029	Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah	87.016.000	81.342.657	93,48	100,00	Efisiensi Biaya Transportasi dan Akomodasi
55	4.05.4.05.01.0004.01.	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK/BKN)	159.985.000	129.024.522	80,65	100,00	Efisiensi Biaya Transportasi dan Akomodasi
	4.05.4.05.01.0005.01.	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	1.191.700.000	1.101.269.599	92,41	100,00	
56	4.05.4.05.01.0005.01.0012	Penilaian Kompetensi ASN Pemprov Jateng dan Kab/Kota	1.191.700.000	1.101.269.599	92,41	100,00	Efisiensi Biaya Transportasi dan Akomodasi
* Jumlah/Rata-rata			33.201.138.000	28.198.722.822	84,93	98,84	

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam Laporan Keuangan ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan bagian dari entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah, khususnya pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah maka Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 disusun disajikan secara akrual. Basis Akrual adalah adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Untuk melengkapi Laporan Keuangan menjadi berbasis akrual maka dibuat Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Operasional (LO) yang menyajikan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit. Sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi perubahan ekuitas dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- 1) Kas di kas daerah
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran
- 4) Tanah
- 5) Peralatan dan Mesin
- 6) Gedung dan Bangunan
- 7) Aset Tetap Lainnya
- 8) Pendapatan
- 9) Belanja

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pelaporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Pendapatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan pendapatan yang bersifat *in-out*. Pendapatan ini terdiri dari penerimaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, Uang Sekolah/ Pendidikan dan Pelatihan, dan Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas, serta Penerimaan lain-lain SKPD (apabila ada).

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.6.477.500.000,00 dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.7.283.780.000,00 atau 112,447%. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp.6.363.380.000,- (691,37%) bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.920.400.000,00. Peningkatan realisasi Pendapatan Daerah sampai 691,37% ini dikarenakan adanya kebijakan fasilitasi pengadaan CPNS Daerah Kabupaten/Kota Formasi Tahun 2018. Berikut rincian anggaran dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2017:

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah	6.477.500.000	7.283.780.000	112,447	920.400.000
Pendapatan Transfer				
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah				
Jumlah	6.477.500.000	7.283.780.000	112,447	920.400.000

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.6.477.500.000,00 dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.7.283.780.000,00 atau 112,447%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp.6.363.380.000,- (691,37%) bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.920.400.000,00. Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 691,37% ini dikarenakan adanya kebijakan fasilitasi pengadaan CPNS Daerah Kabupaten/Kota Formasi Tahun 2018. Berikut rincian anggaran dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2017:

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Daerah				
Retribusi Daerah				
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.477.500.000	7.283.780.000	112,447	920.400.000
Jumlah	6.477.500.000	7.283.780.000	112,447	920.400.000

5.1.1.1.1.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.6.477.500.000,- dengan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp.7.283.780.000,- atau 112,45%. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp.6.363.380.000,- atau 691,37% apabila dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.920.400.000,-. Peningkatan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 691,37% dikarenakan adanya kebijakan fasilitasi pengadaan CPNS Daerah Kabupaten/Kota Formasi Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan				
Hasil Penjualan Aset Lainnya				
Penerimaan Jasa Giro				
Pendapatan Bunga				
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				
Pendapatan Denda Pajak				
Pendapatan Denda Retribusi				
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda				
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan				
Pendapatan dari Pengembalian				
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	5.600.000.000	6.417.480.000,00	114,60	-
Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	860.000.000	848.800.000	98,70	920.400.000
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah				
Pendapatan BLUD				

Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	17.500.000	17.500.000	100,00	-
Jumlah	6.477.500.000	7.283.780.000	112,447	920.400.000

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018. **(Semua Objek Belanja Yang Tidak Dapat Terealisasi < 96% Dijelaskan Secara Rinci di dalam Laporan Realisasi Anggaran).**

5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.47.480.330.179,00 atau 83,519% dengan Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.56.849.881.000,00. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2018 ini mengalami peningkatan sebesar Rp.9.012.441.420,00 (23,43%) bila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.38.467.888.759,00. Peningkatan belanja operasi sebesar 23,43% ini sebagian besar dikarenakan adanya pengadaan CPNSD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2018 dan fasilitasi CPNSD Kabupaten/Kota Formasi Tahun 2018. Berikut rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 dan 2017:

Uraian	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	29.690.562.000	24.265.912.357	81,729	24.406.721.860
Belanja Barang & Jasa	27.159.319.000	23.214.417.822	85,475	14.061.166.899
Jumlah	56.849.881.000	47.480.330.179	83,519	38.467.888.759

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.24.265.912.357,00 atau 81,729% dengan Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.29.690.562.000,00. Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.140.809.503,00 atau 0,58% bila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.24.406.721.860,00. Penurunan realisasi Belanja Pegawai ini dikarenakan pada tahun 2017 tidak ada pengadaan CPNSD Formasi Tahun 2017, sehingga anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan untuk CPNSD Formasi Tahun 2017 tidak terserap. Selain itu, Adanya efisiensi pada Honorarium Panitia Pelaksana ini mengakibatkan penyerapan Anggaran Honorarium PNS tidak optimal. Berikut rinciannya:

Uraian	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Gaji dan Tunjangan	10.699.207.000	9.552.975.979	89,29	10.305.636.535
Tambahan Penghasilan PNS	15.941.855.000	12.441.036.378	78,04	11.880.787.325
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD				
Belanja insentif Pemungut Pajak				
Honorarium PNS	1.455.900.000	1.204.700.000	82,75	1.272.348.000
Honorarium Non PNS	1.593.600.000	1.067.200.000	66,97	947.950.000
Belanja Pegawai BLUD				

Belanja Pegawai BOS				
Jumlah	29.690.562.000	24.265.912.357	81,729	24.406.721.860

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.23.214.417.822,00 atau 85,475% dengan Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.27.159.319.000,00. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 14.061.166.899,00; Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp9.153.250.923,00 atau 65,10%. Peningkatan sebesar 65,10% ini dikarenakan adanya Pengadaan CPNSD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2018 dan Fasilitasi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten/Kota Formasi Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2018		%	2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	1.891.922.000	1.669.667.575	88,25	1.432.615.525
Belanja Bahan/Material	172.491.000	163.065.450	94,54	145.287.100
Belanja Jasa Kantor	2.034.126.000	1.645.352.704	80,89	990.018.484
Belanja Premi Asuransi	101.909.000	95.977.830	94,18	97.286.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	569.960.000	564.459.192	99,03	512.203.712
Belanja Cetak dan Penggandaan	994.215.000	925.641.100	93,10	879.406.350
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.611.460.000	2.277.101.000	87,20	1.192.931.490
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	69.500.000	69.500.000	100	65.500.000
Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.280.615.000	3.532.075.000	82,51	126.185.000
Belanja Makanan dan Minuman	2.203.960.000	1.938.857.232	87,97	1.160.424.643
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	-
Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari Tertentu	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	7.945.591.000	6.385.528.978	80,37	3.924.998.870
Belanja Pemeliharaan	1.123.818.000	1.100.125.241	97,89	1.211.612.060
Belanja Jasa Konsultansi	372.352.000	353.377.000	94,90	273.906.200
Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.682.000.000	2.439.000.000	90,94	1.784.200.000
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	105.400.000	54.689.520	51,89	264.591.465
Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masy	-	-	-	-
Belanja Hadiah Barang	-	-	-	-
Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-
Belanja Pengadaan Jasa Lainnya	-	-	-	-
Belanja Barang Dana BOS	-	-	-	-
Total	27.159.319.000	23.214.417.822	85,475	14.061.166.899

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.712.405.000,00 atau 90,646% dengan Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.992.319.000,00. Apabila dibandingkan dengan

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.839.210.500,00; Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 ini mengalami penurunan sebesar Rp.126.805.500,00 atau 4,47%. Penurunan ini dikarenakan adanya efisiensi pada Biaya Survey dan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Berikut rinciannya :

Uraian	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Pengadaan Tanah				
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin	2.988.319.000	2.708.405.000	90,633	2.836.746.000
Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya	4.000.000	4.000.000	100,00	2.464.500
Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud				
Jumlah	2.992.319.000	2.712.405.000	90,646	2.839.210.500

5.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.708.405.000,00 atau 90,633% dengan Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.988.319.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.128.341.000,00 atau 4,52%, apabila dibandingkan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.836.746.000,00. Penurunan ini dikarenakan adanya efisiensi pada biaya survey asset tetap yang akan dibeli dan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Berikut rinciannya :

Uraian	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Alat Besar				
Belanja Modal Alat Angkutan				
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur				
Belanja Modal Alat Pertanian				
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.467.000.000	1.348.010.000	91,89	1.487.741.000
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar				22.905.000
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan				
Belanja Modal Alat Laboratorium				
Belanja Modal Alat Persenjataan				
Belanja Modal Komputer	1.521.319.000	1.360.395.000	89,42	1.326.100.000
Belanja Modal Alat Eksplorasi				
Belanja Modal Alat Pengeboran				
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan				

Pemurnian				
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi				
Jumlah	2.988.319.000	2.708.405.000	90,633	2.836.746.000

5.1.2.2.2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4.000.000,00 atau 100,00% dari Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp.4.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.464.500,00; Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2018 ini mengalami kenaikan sebesar Rp.1.535.500,00 atau 62,30%. Kenaikan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2018 ini disebabkan karena kebutuhan akan buku perpustakaan cukup tinggi. Berikut rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya :

Uraian	2018		%	2017
	Anggaran	Realisasi		
Bahan Perpustakaan	4.000.000	4.000.000	100,00	2.464.500
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan				
Hewan				
Biota Perairan				
Tanaman				
Barang Koleksi Non Budaya				
Aset Tetap Dalam Renovasi				
Jumlah	4.000.000	4.000.000	100,00	2.464.500

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2018 sebesar (Rp.42.908.955.179,00) sedangkan SiLPA Tahun Anggaran 2017 sebesar (Rp.40.386.699.259,00).

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. ASET

Nilai Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 16.417.241.121,88 mengalami kenaikan sebesar Rp.804.651.413,38 atau 5,15% apabila dibandingkan dengan Nilai Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp.15.612.589.708,50. Kenaikan nilai Aset pada Tahun Anggaran 2018 itu karena adanya pengadaan Aset Tetap pada tahun 2018.

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp.369.967.200,00 mengalami penurunan sebesar Rp.38.888.825,00 atau 9,51% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 408.856.025,00. Penurunan ini dikarenakan penggunaan Alat Tulis Kantor pada tahun 2018 meningkat.

5.2.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00 sama dengan Kas per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas BLUD		
Jumlah	0	0

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2018.

	URAIAN	2018	2017
1	Rekening Bank Bendahara Pengeluaran Pembantu	0	0
	Jumlah	0	0

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2018.

NO	URAIAN	2017	2016
1	-	0	0
2	-	0	0
	Jumlah	0	0

5.2.1.1.2. Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2018, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.369.967.200,00 mengalami penurunan sebesar Rp.38.888.825,00 atau 9,51% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.408.856.025,00. Penurunan Nilai Persediaan pada Tahun Anggaran 2018 ini dikarenakan adanya penggunaan Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak meningkat. Berikut rinciannya :

	2018	2017
Persediaan Barang Habis Pakai	369.967.200	408.856.025
Jumlah	369.967.200	408.856.025

Persediaan Barang Habis Alat Tulis Kantor

No.	Nama Barang	Vol.	Harga Satuan	Saldo Akhir
1	Amplop PUTIH besar	-	19.500	-
2	Amplop PUTIH kecil	2	7.600	15.200
3	Amplop PUTIH tanggung	-	15.000	-
4	Ballpoint Drawing Pen 0,5 mm	35	12.600	441.000
5	Ballpoint Drawing Pen 0,5 mm	70	12.400	868.000
6	Ballpoint Gel ink pen black 1,0 mm	17	10.800	183.600
7	Ballpoint BOLLINER hitam, PILOT	11	31.000	341.000
8	BOXI	-	11.300	-
9	Ballpoint Merah	-	-	-
10	Ballpoint Merah	-	2.700	-
11	Ballpoint hitam	-	6.000	-
12	Ballpoint Pantel	29	78.500	2.276.500
13	Bantalan Stempel	-	-	-
14	Bantalan Stempel	-	10.100	-
15	Bantalan Stempel	1	12.650	12.650
16	Bantalan penghitung uang	-	5.000	-
17	Bantalan penghitung uang	16	7.200	115.200
18	Bantalan penghitung uang	5	7.550	37.750
19	Bantalan penghitung uang	3	12.650	37.950
20	Bantalan penghitung uang	2	7.000	14.000
21	Batubaterai Besar ABC	-	13.000	-
22	Batubaterai Besar ABC	9	13.750	123.750
23	Batubaterai kecil ABC	-	10.500	-
24	Batu baterai REMOTE A2 ALKALIN	-	13.000	-
25	Batu baterai REMOTE A3 ALKALIN	16	12.000	192.000
26	Batu Baterai kotak 9V	-	-	-
27	Batu Baterai kotak 9V	-	31.000	-
28	Binder Clips	6	21.000	126.000
29	Box File	20	18.950	379.000
30	Box File	90	19.000	1.710.000
31	Buku Expedisi isi 100	-	12.500	-
32	Buku Tulis Folio isi 100	-	17.000	-
33	Buku Tulis Folio isi 100	16	19.500	312.000
34	Buku Tulis Folio isi 100	5	14.150	70.750
35	Buku Tulis Folio isi 200	-	-	-
36	Buku Tulis Folio isi 200	13	37.000	481.000
37	Buku Tulis isi 38	-	-	-
38	Buku Tulis kwarto isi 200	25	17.600	440.000
39	Buku Tulis kwarto isi 200	30	22.500	675.000
40	Buku Tulis Kwarto isi 100	60	15.000	900.000
41	CD-DVD	1	10.500	10.500
42	CD-RW	8	9.300	74.400
43	CD-R	13	6.300	81.900

44	CD-R	12	5.000	60.000
45	CALCULATOR	-	-	-
46	CALCULATOR	-	102.000	-
47	CALCULATOR	3	108.000	324.000
48	Cutter kecil	2	9.200	18.400
49	Cutter besar	3	18.575	55.725
50	Data Print (DP.27)	3	27.000	81.000
51	Data Print (DP.28)	13	27.000	351.000
52	Flash Disk	4	91.500	366.000
53	Gunting	-	12.650	-
54	Isi ballpoint PENTEL	-	-	-
55	Isi ballpoint PENTEL	45	26.500	1.192.500
56	Isi Cutter kecil	25	4.500	112.500
57	Isi Cutter kecil	10	8.500	85.000
58	Isi Cutter kecil	10	6.600	66.000
59	Isi Cutter kecil	12	2.500	30.000
60	Isi Cutter kecil	24	4.100	98.400
61	Isi Cutter besar	-	7.550	-
62	Isi Cutter besar	11	6.600	72.600
63	Isi Staples besar	4	2.600	10.400
64	Isi Staples kecil	42	2.500	105.000
65	Isolasi PANFIK besar dan kecil	5	17.500	87.500
66	Karbon Double Folio Daito	13	100.000	1.300.000
67	Karbon Double Folio Daito	3	85.900	257.700
68	Karbon Double Folio Daito	2	78.100	156.200
69	Karbon Double Folio Daito	2	110.000	220.000
70	Karbon Folio	9	42.000	378.000
71	Karbon Folio	2	50.000	100.000
72	Karet Gelang	-	37.800	-
73	Kertas continouse form 1ply 9,5 x 11"	-	200.000	-
74	Kertas continouse form 1ply 14 7/8 x 11"	3	270.000	810.000
75	Kertas continouse form 2ply 9,5 x 11"	-	180.000	-
76	Kertas continouse form 2ply 14 7/8 x 11"	-	368.000	-
77	Kertas continouse form 2ply 14 7/8 x 11"	4	380.000	1.520.000
78	Kertas continouse form 4ply 14, 7/8 x 11"(GAJI)	-	740.000	-
79	Kertas FAX	-	16.250	-
80	Kertas HVS DF BERGARIS	7	42.000	294.000
81	Kertas HVS DF BERGARIS	10	42.500	425.000
82	Kertas HVS DF BERGARIS	16	35.300	564.800
83	Kertas HVS double FOLIO 70 gr	6	75.000	450.000
84	Kertas HVS Folio 70 gram	2	50.000	100.000
85	Kertas HVS kwarto 80 gr	-	-	-
86	Kertas HVS kwarto 80 gr	55	54.000	2.970.000
87	Kertas HVS Folio F4 70gr JAMBON	1	62.500	62.500
88	Kertas HVS Folio F4 70gr KUNING	3	62.500	187.500
89	Kertas HVS Folio F4 70gr HIJAU	1	62.500	62.500
90	Kertas HVS Folio F4 70gr BIRU	1	62.500	62.500
91	Klip besar	-	7.000	-
92	Klip besar	41	12.000	492.000
93	Klip kecil	-	-	-
94	Klip kecil	30	7.000	-
95	Kwitansi Panjang	-	-	-

96	Kwitansi Panjang	-	4.950	-
97	Kwitansi Panjang	3	5.100	15.300
98	Lakban coklat	8	12.000	96.000
99	Lakban hitam	-	12.000	-
100	Lem kertas	-	-	-
101	Lem kertas	2	12.500	25.000
102	Odner FOLIO	-	-	-
103	Odner FOLIO	20	24.000	480.000
104	Pembolong 40 XL-KENKO	18	44.550	801.900
105	Pembolong 40 XL-KENKO	30	88.550	2.656.500
106	Pembolong 40 XL-KENKO	7	60.750	425.250
107	Pembolong 40 XL-KENKO	12	63.500	762.000
108	Penggaris Plastik 30 cm	-	-	-
109	Penggaris 40 cm / AMC	67	5.900	395.300
110	Penggaris 40 cm / AMC	100	60.000	600.000
111	Penghapus Black Board/Papan Tulis	-	11.000	-
112	Penghapus Black Board/Papan Tulis	2	4.950	9.900
113	Pensil 2B	-	5.000	-
114	Pines	5	25.300	126.500
115	Pita mesin ketik hitam, DAITO	18	18.300	329.400
116	Pita mesin ketik hitam, DAITO	70	33.000	2.310.000
117	Pita mesin ketik hitam, DAITO	5	21.075	105.375
118	Pita Printer LQ 2170/2180	11	150.000	1.650.000
119	Pita Printer LQ 2170/2180	4	94.500	378.000
120	Pita Printer LQ 2170/2180	9	130.000	1.170.000
121	Pita Epson LX - 300	-	-	-
122	Pita Epson LX - 300	6	84.000	504.000
123	Pita Epson LX - 300	2	69.000	138.000
124	Pita Epson LX - 310	4	84.000	336.000
125	Pita Epson LX - 310	2	74.000	148.000
126	Plastik Transparan 21,5x33cm / YASHICA	-	20.100	-
127	Portaple / Map bertali	10	10.000	100.000
128	Pita Catridge Compuprint PRKN 102	-	800.000	-
129	Pita Catridge Compuprint PRKN 102	54	840.000	45.360.000
130	Remove RZA, MAX	-	12.625	-
131	Remove RZA, MAX	17	33.000	561.000
132	Refil Toner Laserjet Q.2612A + drum+sparepart	-	365.000	-
133	Refil Toner Laserjet Q.2613A + drum + sparepart	-	365.000	-
134	Refil Toner Laserjet HP.26A + drum + sparepart	-	495.000	-
135	Refil Toner Laserjet HP.29X + drum + sparepart	-	458.000	-
136	Refil Toner Laserjet CB.435 A + drum	-	-	-
137	Refil Toner Laserjet CB.435 A + drum + sparepart	7	365.000	2.555.000
138	Refil Toner Laserjet CB.436 A + drum + sparepart	4	365.000	1.460.000
139	Refil Toner Laserjet 49 A + drum + sparepart	1	365.000	365.000
140	Refil Toner Laserjet Q 7553A + drum sparepart	5	400.000	2.000.000
141	Refil Toner Laserjet HP. 78A+ drum + sparepart	-	458.000	-
142	Refil Toner Laserjet HP. 83A + drum + sparepart	-	458.000	-
143	Refil Toner Laserjet HP. 85A + drum + sparepart	-	458.000	-
144	Refil Tinta Epson ber ID botol 60 ml Black	-	105.000	-
145	Refil Tinta Epson ber ID botol 60 ml Black	-	-	-

146	Refil Tinta Epson ber ID botol 60 ml Magenta	-	105.000	-
147	Refil Tinta Epson ber ID botol 60 ml Yellow	-	105.000	-
148	Refil Tinta Epson ber ID botol 60 ml Cyan	-	105.000	-
149	Sampul coklat	430	550	236.500
150	Sampul coklat	190	3.725	707.750
151	Sampul coklat	500	750	375.000
152	Snelheakter PLASTIK	-	-	-
153	Snelheakter PLASTIK	101	8.900	898.900
154	Snelheakter kertas	75	4.000	300.000
155	Snelheakter kertas	660	1.850	1.221.000
156	Snelheakter kertas	2.340	1.900	4.446.000
157	Snelheakter kertas	625	2.000	1.250.000
158	Stop map kertas	-	2.000	-
159	Stop map kertas	300	600	180.000
160	Spidol besar white board marker hitam	-	11.000	-
161	Spidol kecil snowman	-	2.000	-
162	Spidol MARKER besar hitam	3	12.650	37.950
163	Stabilo/Boss	-	10.570	-
164	Stabilo/Boss	-	14.000	-
165	Stapler / Steples HD-10 Kecil	-	15.500	-
166	Stapler / Steples HD-30 Besar	-	65.000	-
167	Stapler / Steples HD-30 Besar	-	67.000	-
168	Stip pencil, STEADLER	-	-	-
169	Setip Ballpoint / PELIKAN	94	3.200	300.800
170	Setip Ballpoint / PELIKAN	100	3.500	350.000
171	Setip Ballpoint / PELIKAN	100	4.100	410.000
172	Setip Ballpoint / PELIKAN	100	4.000	400.000
173	Tali Rafia besar	-	25.000	-
174	Tinta Hp INKJET C.9351A Black 21	-	272.250	-
175	Tinta Hp INKJET C.9352 Colour 22	-	268.000	-
176	Toner Printer HP Laserjet 1010 Q.2612.A - (12A)	2	1.625.000	3.250.000
177	Toner Printer HP Laserjet 1300 Q.2613.A - (13A)	-	1.820.000	-
178	Toner Printer HP Laserjet HP. CF.226A (26A)	-	2.100.000	-
179	Toner Printer HP Laserjet HP. C.4129X (29X)	-	3.500.000	-
180	Toner Printer HP Laserjet T 1006 CB.435A	-	1.450.000	-
181	Toner Printer HP Laserjet T 1006 CB.435A	1	1.110.000	1.110.000
182	Toner Printer HP Laserjet CB. 436A (36A)	1	1.489.000	1.489.000
183	Toner Printer HP Laserjet 1160 Q.5949.A - (49A)	-	-	-
184	Toner Printer HP Laserjet 1160 Q.5949.A - (49A)	-	1.680.000	-
185	Toner Printer HP Laserjet P.2015 Q.7553.A - (53A)	2	1.660.000	3.320.000
186	Toner Printer HP Laserjet CE 278A - (78A)	-	1.320.000	-
187	Toner Printer HP Laserjet CE 283A - (83A)	2	1.355.000	2.710.000
188	Toner Printer HP Laserjet CE 285A - (85A)	-	1.135.000	-
189	Tinta nomerator warna UNGU, LION	18	11.000	198.000
190	Tinta nomerator warna UNGU, LION	70	12.700	889.000
191	Tinta nomerator warna UNGU, zenith	70	18.000	1.260.000
192	Tinta nomerator warna HITAM	-	12.700	-
193	Tinta nomerator warna HITAM zenith	10	18.000	180.000
194	Tip Ex	-	-	-

195	Tip Ex	5	12.000	60.000
	Jumlah			115.101.200

Persediaan Barang Pakai Habis Cetakan

No.	Nama Barang	Vol.	Harga Satuan	Saldo Akhir
1	Amplop BKD Besar	4.450	3.500	15.575.000
2	Amplop BKD Besar Berkantong	1.525	4.000	6.100.000
3	Amplop BKD Kecil	1.450	1.750	2.537.500
4	Amplop BKD Kecil berkantong	7.850	2.000	15.700.000
5	Amplop BKD Kwarto	-	-	-
6	Amplop BKD Kwarto	3.950	2.500	9.875.000
7	Amplop BKD Kwarto berkantong	1.400	2.500	3.500.000
8	Amplop BKD Kwarto berkantong	4.000	3.500	14.000.000
9	Amplop GUBERNUR Besar	-	2.750	-
10	Amplop GUBERNUR Besar	1.650	2.800	4.620.000
11	Amplop GUBERNUR Besar	2.800	3.500	9.800.000
12	Amplop GUBERNUR Kecil	450	1.700	765.000
13	Amplop GUBERNUR Kecil	9.000	1.750	15.750.000
14	Amplop SETDA Besar	2.400	2.800	6.720.000
15	Amplop SETDA Besar	2.000	3.500	7.000.000
16	Amplop SETDA Kecil	-	1.700	-
17	Amplop SETDA Kecil	11.450	1.750	20.037.500
18	Blangko Kenaikan Gaji Berkala 4ply 8 x 11"	-	1.300.000	-
19	Blangko Format Model DK / SKUMPTK	1	270.000	270.000
20	Blangko Penilaian Kinerja Pegawai (DP.3)	-	325.000	-
21	Blangko Tanda Bukti Pembayaran (B.9.4)	2	45.000	90.000
22	Blangko Tanda Bukti Pembayaran (B.9.4)	15	48.000	720.000
23	Blangko Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 final	2	64.000	128.000
24	Blangko Pemotongan PPh Pasal 23	1	70.000	70.000
25	Blangko Surat Bukti Pengeluaran (B.10.12)	-	43.000	-
26	Blangko Surat Bukti Pengeluaran (B.10.12)	123	48.000	5.904.000
27	Blangko Surat Bukti Pengeluaran (B.10.12)	60	45.000	2.700.000
28	Blangko Surat Tanda Setoran (STS)	29	80.000	2.320.000
29	Blangko Surat Setoran Pajak (SSP)	8	80.000	640.000
30	Buku Agenda Surat Masuk	1	65.000	65.000
31	Buku Agenda Surat Keluar	-	-	-
32	Buku Agenda Surat Keluar	-	65.000	-
33	Buku Inventaris Barang (Bend.18)	1	55.000	55.000
34	Buku Pengadaan Barang (Bend. 20)	3	55.000	165.000
35	Buku Penerimaan Barang (Bend. 21)	3	55.000	165.000
36	Buku Pengeluaran Barang (Bend. 21.a)	3	55.000	165.000
37	Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran	15	70.000	1.050.000
38	Buku Bukti Penerimaan Barang NCR	-	25.000	-
39	Buku Resep Dokter	3	20.000	60.000
40	Cetak Brosur BKD	-	3.200	-
41	Cetak Name Text Kartu Identitas Pegawai	-	-	-
42	Disposisi warna Merah	14	96.000	1.344.000
43	Disposisi warna Merah	45	70.000	3.150.000
44	Dos Arsip BKD	20	12.500	250.000
45	Formulir Isian Pegawai (FIP.01)	-	135.000	-

46	Formulir Isian Pegawai (FIP.01)	-	120.000	-
47	Formulir Isian Pegawai (FIP.02)	-	135.000	-
48	Formulir Isian Pegawai (FIP.02)	-	120.000	-
49	KENDALI Surat Masuk	-	13.000	-
50	KENDALI Surat Keluar	-	15.000	-
51	KENDALI Surat Keluar	-	12.000	-
52	Kartu hasil pemeriksaan kesehatan	-	600	-
53	Kartu Barang (Kuning) bend.22	-	-	-
54	Kartu persediaan Barang bend.23 (Putih)	-	-	-
55	Kartu persediaan Barang bend.23 (Biru)	-	-	-
56	Kartu persediaan Barang bend.23 (jambon)	-	-	-
57	Kartu persediaan Barang bend.23 (hijau)	-	-	-
58	Kartu pemeliharaan kendaraan dinas kuning	-	2.000	-
59	Kop Surat GUBERNUR	20	135.000	2.700.000
60	Kop Surat GUBERNUR	30	255.000	7.650.000
61	Kop Surat Gubernur Logo Garuda Emas	30	250.000	7.500.000
62	Kop Surat BKD	-	130.000	-
63	Kop Surat BKD	302	135.000	40.770.000
64	Kop Surat SETDA	-	-	-
65	Kop Surat SETDA	45	135.000	6.075.000
66	Kertas Catatan Medik	-	-	-
67	Kertas Catatan Medik	1	200.000	200.000
68	Plakat BKD	-	-	-
69	Surat Keterangan Sakit	2	20.000	40.000
70	Surat Keterangan Sehat	2	20.000	40.000
71	Snelhecter Kertas BKD untuk Arsip	-	4.000	-
72	Snelhecter Kertas BKD untuk Arsip	400	4.500	1.800.000
73	Stiker Inventaris Barang	-	-	-
74	Stopmap BKD Rahasia	-	-	-
75	Stopmap BKD Rahasia	500	11.500	5.750.000
76	Stopmap Folio Berlogo BKD	550	11.500	6.325.000
77	Stopmap kwarto Berlogo BKD	1150	6.000	6.900.000
78	Stopmap Folio BATIK	1.550	11.500	17.825.000
	Jumlah			254.866.000

5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp.16.046.473.921,88 mengalami kenaikan sebesar Rp.842.740.238,38 atau 5,54 % apabila dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.15.203.733.683,50. Kenaikan ini dikarenakan adanya pengadaan Aset Tetap sebesar Rp.2.712.405.000,00; Mendapatkan Barang Milik Daerah sebanyak 1 Unit dengan nilai Rp.354.068.500,00; Reklasifikasi dari Aset Tetap sebanyak 41 Unit senilai Rp.165.695.000,00; Aset yang sudah diusulkan penghapusan karena rusak berat/hilang sebanyak 103 Unit dengan nilai Rp.152.336.682,00; dan Aset Tetap sebanyak 33 Unit senilai Rp.243.506.000,00 direklas ke Aset Lainnya. Berikut Rincian Mutasi Aset Tetap yaitu :

Saldo per 31 Desember 2017	Rp.	29.084.746.774
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	2.712.405.000
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-

Mutasi Masuk	Rp.	354.068.500
Reklasifikasi Dari Aset Tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	165.695.000
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	3.232.168.500
Berkurang		
Ekstrakomtable	Rp.	-
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	Rp.	165.695.000
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	395.842.682
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	561.537.682
Saldo per 31 Desember 2018	Rp.	31.755.377.592

5.2.1.3.1. Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp.6.421.500.000,00 sama dengan Nilai Tanah per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2017	Bertambah	Berkurang	2018
Tanah	6.421.500.000	0	0	6.421.500.000
Jumlah	6.421.500.000	0	0	6.421.500.000

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo per 31 Desember 2017	Rp.	6.421.500.000
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	-
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Berkurang		
Ekstrakomtable	Rp.	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-

Saldo per 31 Desember 2018

Rp.

6.421.500.000

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp.16.774.682.792,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.666.630.818,00 atau 18,90% dibandingkan Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 14.108.051.974,00. Kenaikan ini dikarenakan adanya pengadaan Aset Tetap-Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.1.348.010.000,00; Mendapatkan Barang Milik Daerah sebanyak 1 Unit dengan nilai Rp.354.068.500,00; Reklasifikasi dari Aset Tetap sebanyak 41 Unit senilai Rp.165.695.000,00; Pengadaan Aset Komputer sejumlah 151 Unit senilai Rp.165.695.000,00; Aset yang sudah diusulkan penghapusan karena rusak berat/hilang sebanyak 103 Unit dengan nilai Rp.152.336.682,00; Aset Tetap-Alat Komputer sebanyak 41 Unit senilai Rp.165.695.000,00 direklas ke Alat Kantor dan Rumah Tangga dan Aset Tetap-Alat Komputer sebanyak 33 Unit senilai Rp.243.506.000,00 direklas ke Aset Lainnya. Berikut rincian Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018 dan 2017 yaitu:

Uraian	2017	Bertambah	Berkurang	2018
Alat Berat	810.245.000			810.245.000
Alat Angkut	2.868.244.768	354.068.500		3.222.313.268
Alat Bengkel dan Ukur				
Alat Pertanian dan Peternakan				
Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.662.923.010	1.513.705.000	152.336.682	6.024.291.328
Alat Studio dan Komunikasi	344.766.656			344.766.656
Alat-alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	56.498.650			56.498.650
Alat Laboratorium				
Alat-alat Persenjataan				
Alat-alat Komputer	5.365.373.890	1.360.395.000	409.201.000	6.316.567.890
Jumlah	14.108.051.974	3.228.168.500	561.537.682	16.774.682.792

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin terdiri dari :

Saldo per 31 Desember 2017	Rp.	14.108.051.974
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	2.708.405.000
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	354.068.500
Reklasifikasi Aset Tetap	Rp.	165.695.000
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	3.228.168.500
Berkurang		
Ekstrakomtable	Rp.	-

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	165.695.000
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	395.842.682
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	561.537.682
Saldo per 31 Desember 2018	Rp.	16.774.682.792

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.7.566.703.700,00 sama dengan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2017	Bertambah	Berkurang	2018
Gedung	7.566.703.700	0	0	7.566.703.700
Monumen				
Jumlah	7.566.703.700	0	0	7.566.703.700

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan terdiri dari :

Saldo per 31 Desember 2017	Rp.	7.566.703.700
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	-
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Berkurang		
Ekstrakomtable	Rp.	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Saldo per 31 Desember 2018	Rp.	7.566.703.700

5.2.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.799.998.000,00 tidak mengalami perubahan atau sama dengan Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2017	Bertambah	Berkurang	2018
Jalan dan Jembatan				
Bangunan Air/Irigasi				
Instalasi	799.998.000	0	0	799.998.000
Jaringan				
Jumlah	799.998.000	0	0	799.998.000

Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari :

Saldo per 31 Desember 2017	Rp.	799.998.000
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	-
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Berkurang		
Ekstrakomtable	Rp.	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Saldo per 31 Desember 2018	Rp.	799.998.000

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp.192.493.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.4.000.000,00 atau 2,12% apabila dibandingkan dengan Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp.188.493.100,00. Kenaikan ini disebabkan peningkatan kebutuhan akan buku perpustakaan. Berikut rinciannya:

Uraian	2017	Bertambah	Berkurang	2018
Buku Perpustakaan	27.993.100	4.000.000	0	31.993.100
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	160.500.000	0	0	160.500.000
Hewan, Ternak dan Tanaman				
Jumlah	188.493.100	4.000.000	0	192.493.100

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya terdiri dari :

Saldo per 31 Desember 2017	Rp.	188.493.100
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	4.000.000
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	4.000.000
Berkurang		
Ekstrakomtable	Rp.	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Saldo per 31 Desember 2018	Rp.	192.493.100

5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar (Rp.15.708.903.670,12) mengalami kenaikan sebesar (Rp.1.827.890.579,62) atau 13,17% apabila dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar (Rp13.881.013.090,50) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	2018	2017
1	Alat-alat Besar	(390.617.500,00)	(290.267.000,00)
2	Alat-alat Angkutan	(2.474.252.205,50)	(2.164.282.268,00)
3	Alat-alat Bengkel dan Ukur	-	-
4	Alat-alat Pertanian	-	-
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	(3.888.498.458,60)	(3.330.266.336,80)
6	Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	(304.882.456,00)	(264.720.104,80)
7	Alat-alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	(56.498.650,00)	(55.098.650,00)
8	Alat-alat Laboratorium	-	-
9	Alat-alat Persenjataan	-	-
10	Alat-alat Komputer	(4.685.039.290,00)	(4.041.947.490,00)
11	Alat-alat Eksplorasi	-	-
12	Alat-alat Pengeboran	-	-

13	Alat-alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian	-	-
14	Alat-alat Bantu Eksplorasi	-	-
15	Alat-alat Keselamatan Kerja	-	-
16	Alat-alat Peraga	-	-
17	Alat-alat Peralatan Proses/Produksi	-	-
18	Alat-alat Rambu-Rambu	-	-
19	Alat-alat Olahraga	-	-
20	Bangunan Gedung	(3.609.222.510,02)	(3.454.538.590,90)
21	Monumen	-	-
22	Bangunan Menara	-	-
23	Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-
24	Jalan dan Jembatan	-	-
25	Bangunan Air / Irigasi	-	-
26	Instalasi	(299.892.600,00)	(279.892.650,00)
27	Jaringan	-	-
28	Aset Tetap Renovasi	-	-
	JUMLAH	(15.708.903.670,12)	(13.881.013.090,50)

5.2.1.5. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp.800.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.800.000,00 apabila dibandingkan dengan Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	-	-
Aset Tak Berwujud	151.539.500	151.539.500
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(151.539.500)	(151.539.500)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto	-	-
Aset Lain-Lain (Barang Rusak Berat)	395.842.682	253.760.035
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(395.042.682)	(253.760.035)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Netto	800.000	-
Jumlah Aset Lainnya	800.000	-

5.2.1.5.1. Aset Tidak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp.151.539.500,00 tidak mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017.

5.2.1.5.2. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp.151.539.500,00 tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2018.

5.2.1.5.3. Aset Lain-Lain (Barang Rusak Berat)

Adapun Aset Lainnya ataupun Barang Rusak Berat yang diusulkan Penghapusan Laporan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sejumlah 136 Unit sebesar Rp.395.842.682,00 terdiri dari Alat Kantor dan Rumah Tangga sejumlah 103 Unit senilai Rp.152.336.682,00 dan Alat Komputer sejumlah 33 Unit dengan Nilai Rp.243.506.000,00

Uraian	2018	2017
PERALATAN DAN MESIN		
Alat-alat Besar		
Alat-alat Angkutan		
Alat-alat Bengkel dan Ukur		
Alat-alat Pertanian		
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	152.336.682	247.388.035
Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		6.372.000
Alat-alat Kedokteran dan Alat Kesehatan		
Alat-alat Laboratorium		
Alat-alat Persenjataan		
Alat-alat Komputer	243.506.000	
Alat-alat Eksplorasi		
Alat-alat Pengeboran		
Alat-alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian		
Alat-alat Bantu Eksplorasi		
Alat-alat Keselamatan Kerja		
Alat-alat Peraga		
Alat-alat Peralatan Proses/Produksi		
Alat-alat Rambu-Rambu		
Alat-alat Olahraga		
Jumlah	395.842.682	253.760.035

5.2.1.5.4. Penyusutan Aset Lain-Lain (Barang Rusak Berat)

Nilai Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2018 sebesar (Rp.395.042.682,00) mengalami kenaikan sebesar (Rp.141.282.647,00) atau 55,68% apabila dibandingkan dengan Nilai Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2017 sebesar (Rp.253.760.035,00).

Uraian	2018	2017
PERALATAN DAN MESIN		
Alat-alat Besar		
Alat-alat Angkutan		
Alat-alat Bengkel dan Ukur		
Alat-alat Pertanian		
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	151.536.682	247.388.035
Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		6.372.000
Alat-alat Kedokteran dan Alat Kesehatan		
Alat-alat Laboratorium		
Alat-alat Persenjataan		
Alat-alat Komputer	243.506.000	
Alat-alat Eksplorasi		
Alat-alat Pengeboran		
Alat-alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian		
Alat-alat Bantu Eksplorasi		
Alat-alat Keselamatan Kerja		
Alat-alat Peraga		
Alat-alat Peralatan Proses/Produksi		
Alat-alat Rambu-Rambu		
Alat-alat Olahraga		

Uraian	2018	2017
Jumlah	395.042.682	253.760.035

5.2.2. EKUITAS

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar (Rp.26.491.714.057,12) mengalami penurunan sebesar (Rp.42.104.303.765,62) atau -269,68% apabila dibandingkan dengan Nilai Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp.15.612.589.708,50.

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dicatat dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul sebagai hak pemerintah untuk menagih selama Tahun Anggaran 2018. Nilai Pendapatan-LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp.7.283.780.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.6.363.380.000,00 atau 691,37% dibandingkan dengan Nilai Pendapatan-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp.920.400.000,00. Peningkatan nilai Pendapatan – LO sebesar 691,37% ini dikarenakan adanya kebijakan fasilitasi pengadaan CPNS Daerah Kabupaten/Kota Formasi Tahun 2018. Berikut rinciannya :

Uraian	2018	2017
Pendapatan Asli daerah	7.283.780.000	920.400.000
Pendapatan Transfer		
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO		
Jumlah	7.283.780.000	920.400.000

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO

Nilai Pendapatan Asli Daerah - LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp.7.283.780.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.6.363.380.000,00 atau 691,37% dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Asli Daerah – LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp.920.400.000,00. Peningkatan nilai Pendapatan Asli Daerah – LO sebesar 691,37% ini dikarenakan adanya kebijakan fasilitasi pengadaan CPNS Daerah Kabupaten/Kota Formasi Tahun 2018. Berikut rinciannya :

Uraian	2018	2017
Pendapatan Pajak Daerah - LO		
Pendapatan Retribusi Daerah - LO		
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		
Lain-Lain PAD yang Sah - LO	7.283.780.000	920.400.000
Jumlah	7.283.780.000	920.400.000

5.3.1.1.1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO

Nilai Pendapatan Asli Daerah - LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp.7.283.780.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.6.363.380.000,00 atau 691,37% dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Asli Daerah – LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp.920.400.000,00. Peningkatan nilai Pendapatan Asli Daerah – LO sebesar 691,37% ini dikarenakan adanya kebijakan fasilitasi pengadaan CPNS Daerah Kabupaten/Kota Formasi Tahun 2018. Rinciannya sebagai berikut :

Uraian	2018	2017
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO		

Uraian	2018	2017
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO		
Penerimaan Jasa Giro - LO		
Pendapatan Bunga - LO		
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO		
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO		
Pendapatan Denda Pajak - LO		
Pendapatan Denda Retribusi - LO		
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO		
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO		
Pendapatan dari Pengembalian - LO		
Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum - LO	6.417.480.000	
Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO	848.800.000	920.400.000
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO		
Pendapatan BLUD - LO		
Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LO	17.500.000	
Jumlah	7.283.780.000	920.400.000

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dicatat pada Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh Pengguna Anggaran dan barang telah diterima. Nilai Beban per 31 Desember 2018 sebesar Rp.49.653.635.140,62 mengalami kenaikan sebesar Rp.9.495.826.164,01 atau 23,65% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban per 31 Desember 2017 sebesar Rp.40.157.808.976,61. Kenaikan ini dikarenakan adanya kebijakan Pengadaan CPNSD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2018.

5.3.2.1. Beban Operasional

Nilai Beban Operasional per 31 Desember 2018 sebesar Rp.49.653.635.140,62 mengalami kenaikan sebesar Rp.9.495.826.164,01 atau 23,65% dibandingkan Nilai Beban Operasional per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 40.157.808.976,61. Kenaikan ini dikarenakan adanya kebijakan Pengadaan CPNSD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2018.

Uraian	2018	2017
Beban Pegawai	24.265.912.357	24.406.721.860,00
Beban Persediaan	1.871.621.850,00	1.588.707.600,00
Beban Jasa	7.973.383.534,00	2.745.827.174,00
Beban Pemeliharaan	1.664.584.433,00	1.723.815.772,00
Beban Perjalanan Dinas	6.385.528.978,00	3.924.998.870,00
Beban Bunga	-	-
Beban Subsidi	-	-
Beban Hibah	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-
Beban Penyusutan/Amortisasi	2.134.416.136,62	1.723.799.492,61
Beban Lain-Lain	5.358.187.852,00	4.043.938.208,00
Jumlah	49.653.635.140,62	40.150.578.976,61

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Nilai Beban Pegawai per 31 Desember 2018 sebesar Rp.24.265.912.357,00 mengalami penurunan sebesar (Rp.140.809.503,00) atau -0,58% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Pegawai per 31 Desember 2017 sebesar Rp.24.406.721.860,00. Penurunan Beban Pegawai ini dikarenakan pada tahun 2017 tidak ada pengadaan CPNSD Formasi Tahun 2017, sehingga anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan untuk CPNSD

Formasi Tahun 2017 tidak terserap. Selain itu, Adanya efisiensi pada Honorarium Panitia Pelaksana ini mengakibatkan penyerapan Anggaran Honorarium PNS tidak optimal. Berikut rinciannya :

Uraian	2018	2017
Beban Pegawai Tidak langsung	21.994.012.357	22.186.423.860
Beban Pegawai Langsung	2.271.900.000	2.220.298.000
Jumlah	24.265.912.357	24.406.721.860

5.3.2.1.2. Beban Persediaan

Nilai Beban Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.871.621.850,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.282.914.250,00 atau 17,81% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.588.707.600,00. Kenaikan Beban Persediaan ini dikarenakan peningkatan penggunaan Bahan Habis Pakai pada tahun 2018. Berikut rinciannya :

Uraian	2018	2017
Beban Habis Pakai	1.708.556.400,00	1.443.420.500,00
Beban Bahan/Material	163.065.450,00	145.287.100,00
Beban Pakaian Dinas Dan Atributnya	-	-
Beban Pakaian Kerja	-	-
Beban Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	-	-
Beban Makanan Dan Minuman	-	-
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-
Beban Hadiah Barang	-	-
Jumlah	1.871.621.850,00	1.588.707.600,00

5.3.2.1.3. Beban Jasa

Nilai Beban Jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp.7.973.383.534,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.5.227.556.360,00 atau 190,38% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.2.745.827.174,00. Kenaikan Beban Jasa ini dikarenakan adanya pengadaan CPNSD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2018. Berikut rinciannya :

Uraian	2018	2017
Beban Jasa Kantor	1.645.352.704,00	990.018.484,00
Beban Premi Asuransi	95.977.830,00	97.286.000,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.277.101.000,00	1.192.931.490,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	69.500.000,00	65.500.000,00
Beban Sewa Alat Berat	-	-
Beban Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.532.075.000,00	126.185.000,00
Beban Jasa Konsultansi	353.377.000,00	273.906.200,00
Beban Pengadaan Jasa Lainnya	-	-
Jumlah	7.973.383.534,00	2.745.827.174,00

5.3.2.1.4. Beban Pemeliharaan

Nilai Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.664.584.433,00 mengalami penurunan sebesar (Rp.59.231.339,00) atau (3,44%) apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.723.815.772,00. Kenaikan Beban Jasa ini dikarenakan adanya penurunan Beban Perawatan Kendaraan Bermotor dan Beban Pemeliharaan. Berikut rinciannya :

Uraian	2018	2017
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	564.459.192,00	512.203.712,00
Beban Pemeliharaan	1.100.125.241,00	1.211.612.060,00
Jumlah	1.664.584.433,00	1.723.815.772,00

5.3.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Nilai Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 sebesar Rp.6.385.528.978,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.460.530.108,00 atau 62,69% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2017 sebesar Rp.3.924.998.870,00. Kenaikan Beban Perjalanan Dinas ini dikarenakan adanya Pengadaan CPNSD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2018. Berikut rinciannya :

Uraian	2018	2017
Beban Perjalanan Dinas	6.385.528.978,00	3.924.998.870,00
Jumlah	6.385.528.978,00	3.924.998.870,00

5.3.2.1.10. Beban Penyusutan/Amortisasi

Nilai Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp.2.134.416.136,62 mengalami kenaikan sebesar Rp.410.616.644,00 atau 23,82% dibandingkan dengan Nilai Beban Penyusutan/Amortisasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.723.799.492,61.

Uraian	2018	2017
Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin	1.958.762.580,10	1.548.268.623,50
Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	154.683.919,12	154.683.919,11
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	19.999.950,00	19.999.950,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	847.000,00
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	969.687,40	-
Jumlah	2.134.416.136,62	1.723.799.492,61

5.3.2.1.11. Beban Lain-Lain

Nilai Beban Lain-Lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp.5.358.187.852,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.314.249.644,00 atau 32,50% per 31 Desember 2017 sebesar Rp.4.043.938.208,00.

Uraian	2018	2017
Beban Barang dan Jasa	5.358.187.852	4.036.708.208
Beban Penyisihan Piutang	-	-
Beban Lain-Lain	-	7.230.000,00
Jumlah	-	-

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

NO.	URAIAN	2018	2017
1	Ekuitas Awal	15.612.589.708,50	14.970.458.177,11
2	Surplus/Defisit-LO	(42.369.855.140,62)	(39.237.408.976,61)
3	RK-PPKD	42.908.955.179,00	40.386.699.259,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	265.551.375,00	(507.158.751,00)
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Pengeluaran	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas	-	-
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya	-	-
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang	-	-
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Persediaan	-	-
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen	-	-
4.6	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-
4.7	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	(41.774.182,00)	(576.032.751,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	354.068.500,00	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap	165.695.000,00	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	-	(576.032.751,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap	(165.695.000,00)	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(395.842.682,00)	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap	-	-
4.8	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	(88.517.125,00)	68.874.000,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	(88.517.125,00)	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	-	68.874.000,00
4.9	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	395.842.682,00	-

	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tak Berwujud	-	-
	Koreksi/Penyesuaian Tambah Koreksi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Mutasi dari Aset Tetap	395.842.682,00	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklas Pemanfaatan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tak Berwujud	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Mutasi ke Aset Tetap	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklas Pemanfaatan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi	-	-
4.10	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi	-	-
4.11	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	-	-
4.12	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Lain-Lain	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Lain-Lain	-	-
5	Ekuitas Akhir	16.417.241.121,88	15.612.589.708,50

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum

Secara historis Badan Kepegawaian Daerah lahir sebagai konsekuensi pelaksanaan Otonomi Daerah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu pasalnya mengisyaratkan adanya kewenangan pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.

Selanjutnya nama lembaga Badan Kepegawaian Daerah sendiri mulai di sebut untuk pertama kalinya dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian pada pasal 34A yang menegaskan bahwa "Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah".

Berdasar Ketentuan Tersebut diatas maka untuk pembentukan lembaga Badan Kepegawaian Daerah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menempatkan fungsi manajemen kepegawaian yang semula dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian pada Sekretariat Daerah, dialihkan kepada lembaga tersendiri yang melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian, yaitu Badan Kepegawaian Daerah.

Oleh karena itu, pada tahun 2001 dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang *Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pemb Lintas Kab/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Badan Kepegawaiaan Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Masal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27)* dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu lembaga perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, yang menempati kantor di Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang.

Sehubungan dengan adanya PP nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai lembaga baru yang lahir di era reformasi, Badan Kepegawaian Daerah dengan mengemban amanat sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah, mulai menata diri dengan melakukan penataan dari segi sistem, personil maupun pelayanannya.

Guna memantapkan eksistensi dan arah perjuangan dalam mengemban amanat tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan pembangunan bidang kepegawaian

yaitu “**Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN**” sebagai cita-cita yang ingin diwujudkan.

Selanjutnya untuk mewujudkan visinya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan misi yang selanjutnya dijabarkan dalam program-program kegiatan setiap tahunnya. Dalam mengemban misinya dan pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya Badan Kepegawaian Daerah berusaha memanfaatkan perkembangan teknologi informatika dan komputer dengan mendayagunakan serta meningkatkan kemampuan personilnya. Hasilnya telah terwujud beberapa program aplikasi komputer untuk pengelolaan data dan penyelesaian administrasi kepegawaian.

Di samping itu sebagai Badan yang membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, telah dikembangkan beberapa program kegiatan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dan kualitas manajemen kepegawaian.

6.2 Penyelenggaraan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sejak Berdirinya hingga sekarang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh:

1. Widadi, SH	30 Juni 2001	s/d	4 Maret 2006
2. Drs Agus Setianto	4 Maret 2006	s/d	31 Agustus 2011
3. Suko Mardiono, SH, MM	9 September 2011	s/d	29 Januari 2015
4. Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si	1 Februari 2015	s/d	sekarang

6.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

6.3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Adapun dalam rangka implementasi visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan pembangunan bidang kepegawaian adalah “**Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN**”, sebagai wujud dari amanah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan 2 (dua) Sasaran, yaitu Distribusi Penempatan PNS Dalam Jabatan dan Pelayanan Kepegawaian Yang Cepat dan Terintegrasi.

6.3.2 Strategi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Strategi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan pegawai dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan yang akan pensiun dalam lima tahun.
2. Pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif.
3. Pengembangan karir melalui pembinaan karier dan peningkatan kompetensi.
4. Promosi, mutasi dan rotasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
5. Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja dengan metode yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan penyusunan strategi untuk mengatasinya serta penggunaannya untuk promosi, mutasi dan demosi serta diklat.

6. Penggajian, penghargaan berdasarkan penilaian kinerja dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku pegawai ASN.
7. Perlindungan dan pemberian kemudahan dalam pelaksanaan tugas.
8. Penyediaan sistem pendukung untuk peningkatan kualitas layanan kepegawaian.

6.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

6.4.1 Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam sistem kepegawaian secara nasional, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki posisi penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan difungsikan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian untuk diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.

Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, pengadaan, pengangkatan, penempatan, pengembangan, penggajian, pembinaan dan pemberhentian. Dengan demikian kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan merupakan unsur penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- d. Pembinaan teknis di bidang kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.4.2. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

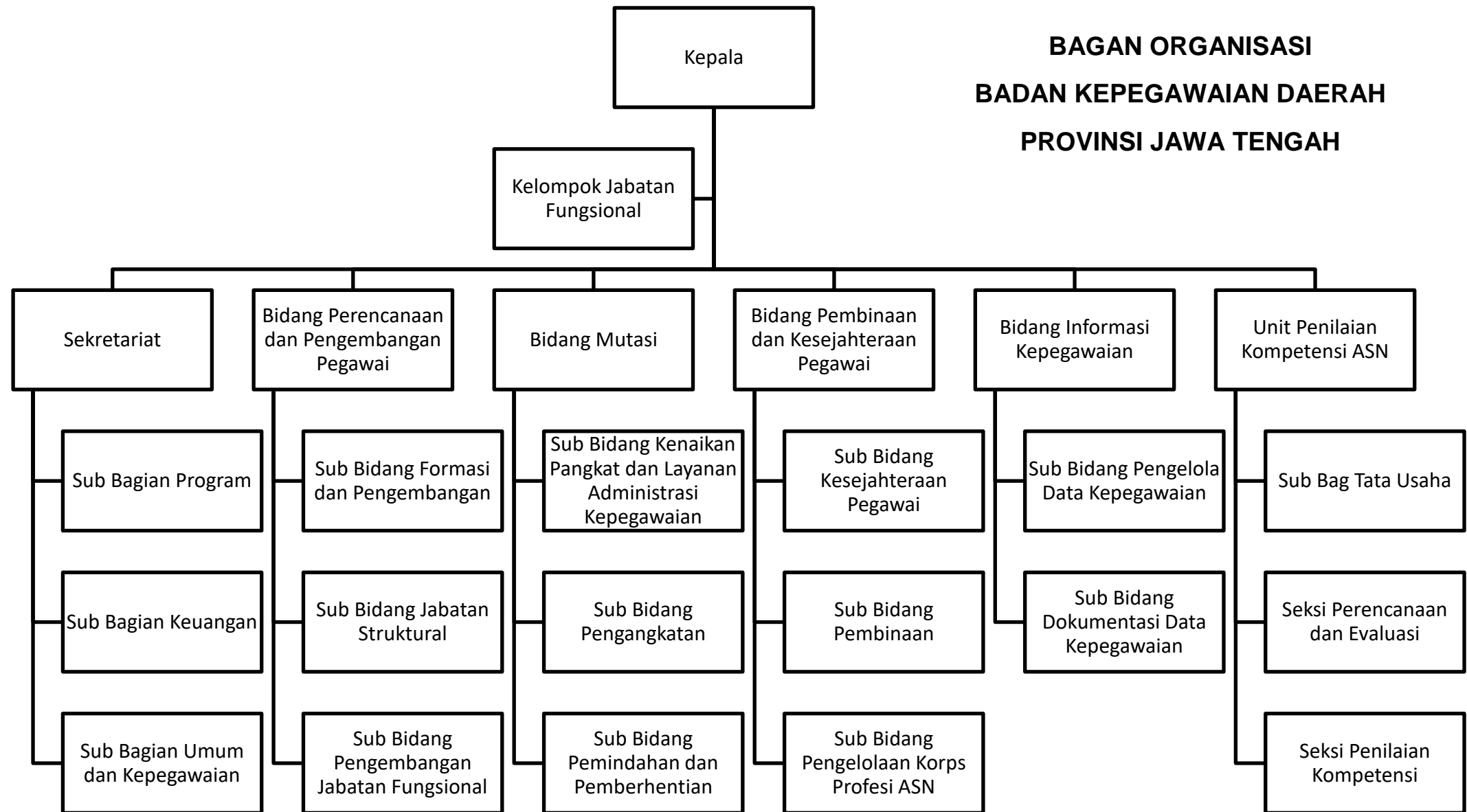
Di dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Program;

- b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 - a. Subbidang Formasi dan Pengembangan;
 - b. Subbidang Jabatan Struktural; dan
 - c. Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional.
 4. Bidang Mutasi, terdiri dari :
 - a. Subbidang Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian;
 - b. Subbidang Pengangkatan; dan
 - c. Subbidang Pemindehan dan Pemberhentian.
 5. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
 - a. Subbidang Kesejahteraan Pegawai;
 - b. Subbidang Pembinaan; dan
 - c. Subbidang Pengelolaan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara.
 6. Bidang Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pengelola Data Kepegawaian; dan
 - b. Subbidang Dokumentasi Data Kepegawaian.
 7. Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi ASN, terdiri dari:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - c. Seksi Penilaian Kompetensi ASN.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - a. Fungsional Tenaga Kesehatan di Poliklinik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi dokter dan perawat;
 - b. Fungsional Assessor Sumberdaya Aparatur;
 - c. Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKD Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



BAB VII

PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 ini kami susun untuk dapat memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahannya yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di tahun yang akan datang, sekaligus sebagai pertanggungjawaban Pengguna Anggaran kepada Gubernur Jawa Tengah.

Daftar Lampiran Tambahan

Daftar lampiran tambahan antara lain meliputi :

1. Lampiran 1.2 Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak E-Penatausahaan)
2. Lampiran II Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak E-Penatausahaan)
3. Daftar Aset Tetap Tahun Anggaran 2018.
4. Daftar Aset Lainnya Tahun Anggaran 2018.
5. Daftar Dana Bergulir Tahun Anggaran 2018.
6. Berita Acara Stock Opname Tahun Anggaran 2018.
7. Berita Acara Serah Terima Aset Tahun Anggaran 2018.
8. Berita Acara Penghapusan Aset dan Hibah Aset Tahun Anggaran 2018.
9. Lampiran lain terkait dengan penjelasan dalam CaLK (bila ada).

***Catatan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD**

1. Cover Buku Pertanggungjawaban APBD dapat ditambahkan gambar menurut SKPD.
2. Penyusunan narasi CaLK menggunakan jenis huruf Times New Roman 11.
3. Penyusunan tabel CaLK menggunakan jenis huruf Arial 8.
4. Pencetakan Buku Pertanggungjawaban APBD menggunakan jilid spiral dan diberi kertas pembatas di setiap bab.
5. Penyerahan buku pertanggungjawaban sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai sofcopy dalam bentuk CD.